

ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA MERDEKA BELAJAR

**DISAMPAIKAN SEBAGAI MATERI
PENGAYAAN DALAM PERKULIAHAN
EVALUASI KEBIJAKAN**

oleh; R.Muktiono Waspodo
(Widyaprada Ahli Utama)





AGENDA

- 1 Informasi Pendidikan di Indonesia**
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar**
- 3 Advokasi Kebijakan**
- 4 Manajemen Perubahan**
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif**
- 6 Rencana Kerja**



12 Rekomendasi Bank Dunia

termuat pada Laporan resmi Bank Dunia 2020,

1. Memastikan **setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran** dan perkembangan di setiap jenjang pendidikan.
2. Menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang **berkualitas dan dapat diakses** oleh semua masyarakat.
3. Mengambil langkah untuk **menjamin pemerataan akses** terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas, terutama bagi anak-anak yang paling berpotensi berada di luar sistem

Sumber:

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/11/19/105030671/12-rekomendasi-bank-dunia-untuk-pendidikan-indonesia?page=all>

Penulis : Elisabeth Diandra Sandi

Editor : Yohanes Enggar Harususilo



4. Mengambil langkah untuk **meningkatkan hasil belajar** para siswa yang memiliki prestasi paling rendah.
5. Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus **berhasil dalam belajar**.
6. **Meningkatkan kualitas** perguruan tinggi dan calon guru yang masuk dan rekrut calon guru terbaik dan distribusikan secara efektif.
7. Meningkatkan **pengembangan profesional** dan menyesuaikan dengan insentif.
8. **Memperkuat** mekanisme **akuntabilitas** melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik.
9. Mendukung lembaga yang ada untuk **meningkatkan pemberian layanan pendidikan**.



10. Memperluas akses dan meningkatkan **mutu** dan **relevansi** pendidikan vokasi
11. Meningkatkan **kualitas, relevansi, dan pemerataan** sektor pendidikan tinggi.
12. Sebagai salah satu cara penanganan dan pemulihan Covid-19, **perkuat sistem** untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan

Perumusan dan pemberian rekomendasi dari Bank Dunia 2020 merupakan panduan yang berbasis pada bukti sebagai informasi dalam proses pertimbangan oleh seluruh pemangku kepentingan di masa depan Indonesia, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana, guru, siswa, dan orang tua.

Elemen-elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju antara lain adalah, tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan

- Kesadaran/ Persepsi
- Akses
- Keterjangkauan
- Tekanan eksternal

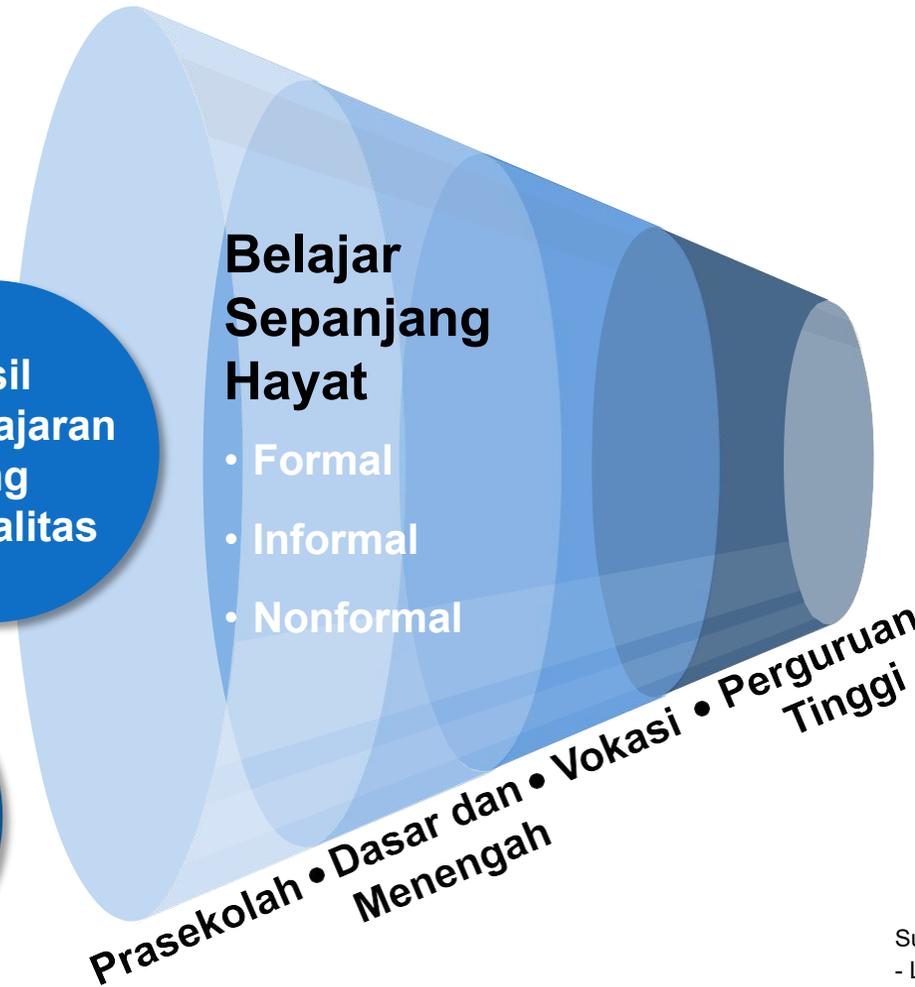
1 Tingginya angka partisipasi siswa

- Kurikulum dan program
- Pola pikir dan 'agen siswa'
- Infrastruktur
- Pedagogi
- Penilaian
- Ekosistem

2 Hasil pembelajaran yang berkualitas

- Geografis
- Budaya dan/atau sosioekonomi
- Infrastruktur
- Pemerintahan
- Pembiayaan

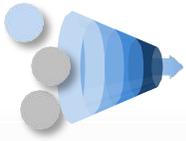
3 Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif



Masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera

Sumber:

- Laporan Analisa Kearney,-
- Naskah Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2023
- Naskah Sistem Penjaminan Mutu Dikdasmen

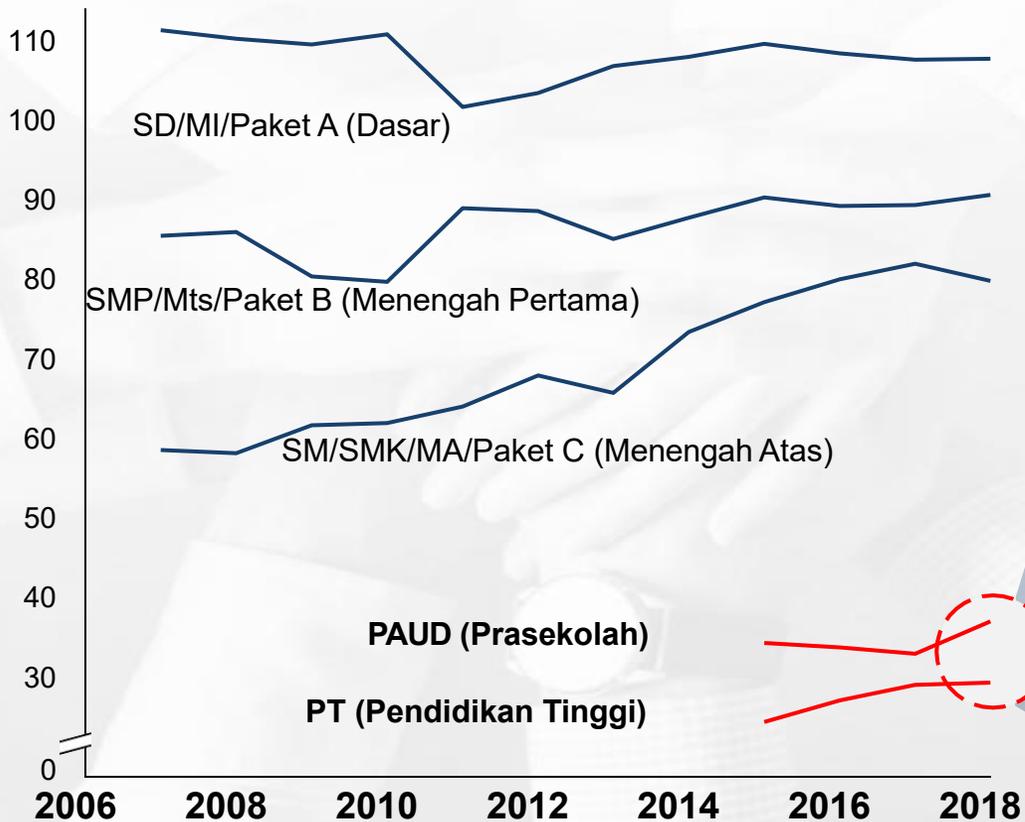


Secara keseluruhan, angka partisipasi siswa di Indonesia terus meningkat; kesenjangan yang tersisa berada di tingkat prasekolah dan pendidikan tinggi...

1 Tren dan *benchmark* penerimaan siswa

Angka Partisipasi Kasar

(%; 2006-2018)

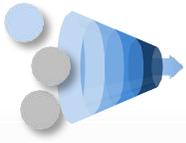


Benchmark

Angka Partisipasi Kasar
(%; 2017 atau setelahnya)



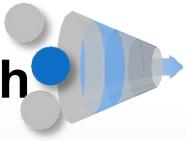
... yang disebabkan rendahnya kesadaran dan terbatasnya/ rendahnya kesetaraan akses pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi



1 Tren dan permasalahan angka partisipasi

Jenjang	Permasalahan Utama
Prasekolah 	<p>Rendahnya kesadaran/ persepsi</p> <p>Kesadaran orang tua terhadap pentingnya perkembangan anak usia dini/masa emas rendah</p> <p>Terbatasnya akses</p> <p>25% desa di Indonesia tidak memiliki pendidikan prasekolah</p>
Pendidikan Tinggi 	<p>Rendahnya kesadaran/ persepsi</p> <p>“... setidaknya butuh 6 tahun bagi lulusan politeknik sebelum dipromosikan ke tingkat yang sama dengan <i>fresh graduate</i> perguruan tinggi” <i>Direktur, Politeknik Manufaktur Astra</i></p> <p>Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hanya 11% di kelompok pengeluaran rumah tangga kuartil terendah; berkurang banyak dari 70% untuk tingkat sekolah menengah dan >60% pada kuartil tertinggi</p>

Hasil PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah



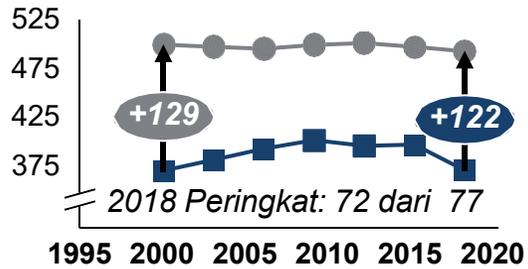
2 Tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah

Skor PISA dan Peringkat (#; 2000-2018)

—●— OECD —■— Indonesia



Membaca

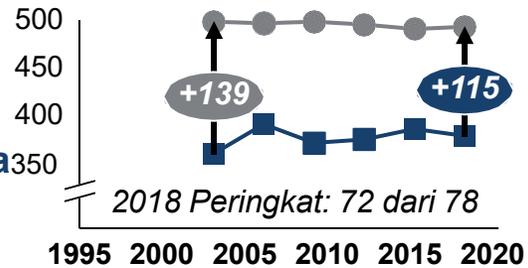


70% siswa berada di bawah kompetensi minimum

- Konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah



Matematika



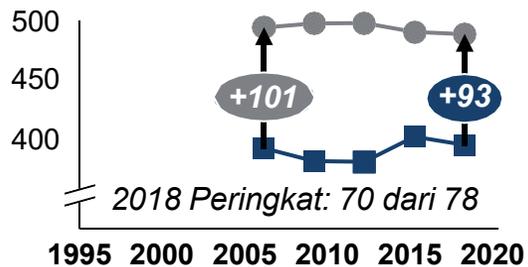
71% siswa berada di bawah kompetensi minimum

- Skor PISA yang stagnan dalam 10-15 tahun terakhir

- Namun demikian, selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat

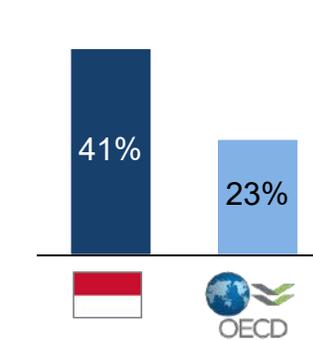


Sains



60% siswa berada di bawah kompetensi minimum

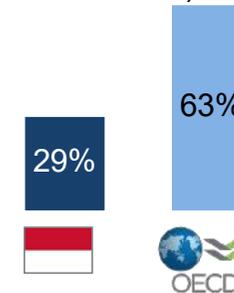
Perundungan (% siswa; 2018)



41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan (vs. 23% rata-rata OECD)

Siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca¹, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah

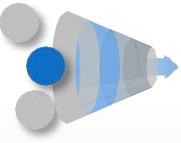
Pola pikir untuk berkembang (% siswa; 2018)



Hanya 29% siswa Indonesia setuju bahwa 'kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak' (vs. 63% rata-rata OECD)

Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca¹, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius, menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting

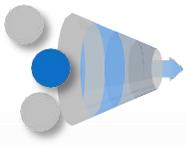
Kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah yang disebabkan kualitas guru, infrastruktur, dan kesenjangan pada pemerintahan



2 Permasalahan utama yang menyebabkan kurangnya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah

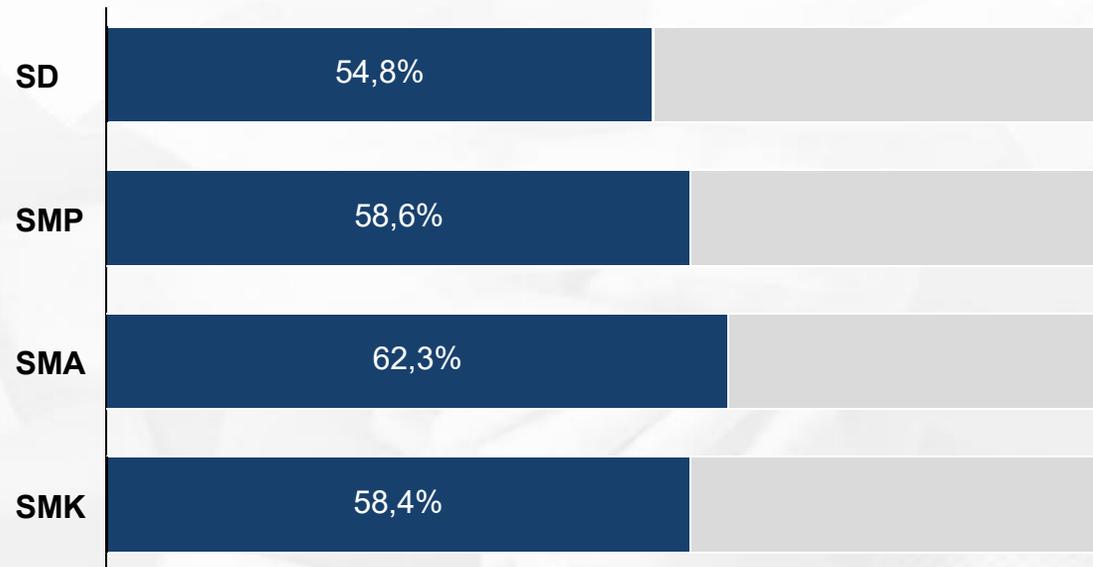
A Kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar	Guru bertindak sebagai pemberi ilmu , bukan fasilitator, dan kurang atau tidak fokus pada pengembangan karakter dan penanaman rasa senang belajar	Pertanyaan guru cenderung dangkal karena ~90% jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan berpikir aras tinggi (higher order thinking) dan kurang penjelasan/alasan jawaban
B Infrastruktur sekolah yang tidak memadai	Rata-rata skor kompetensi guru adalah 57 dari 100 >50% sekolah di Indonesia setidaknya rusak ringan	>40% dari seluruh sekolah tidak memiliki akses internet , khususnya pada jenjang SD >20% sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan 'produktif'
Kurikulum yang kaku dan berbasis materi	Kurikulum memiliki materi yang terlalu banyak, tidak ada ruang untuk memahami materi, melakukan refleksi pembelajaran , dsb. <i>Kepala Sekolah, Kolese Kanisius</i>	"Kurikulum tidak cukup praktis dan operasional untuk diterjemahkan oleh guru ke dalam materi pembelajaran dan aktivitas di dalam kelas"
Kesenjangan pemerintahan	Hampir tidak ada korelasi antara pelatihan guru dan bantuan pembiayaan sekolah serta peningkatan kualitas Sejumlah besar guru honor digaji di bawah upah minimum	"Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif untuk meningkatkan hasil belajar karena status PNS" " Otonomi daerah dan koordinasi antarkementerian membuat implementasi menjadi sulit" <i>COO, Sampoerna School Systems</i>

Kemampuan guru-guru di Indonesia masih belum sebaik standar yang diharapkan



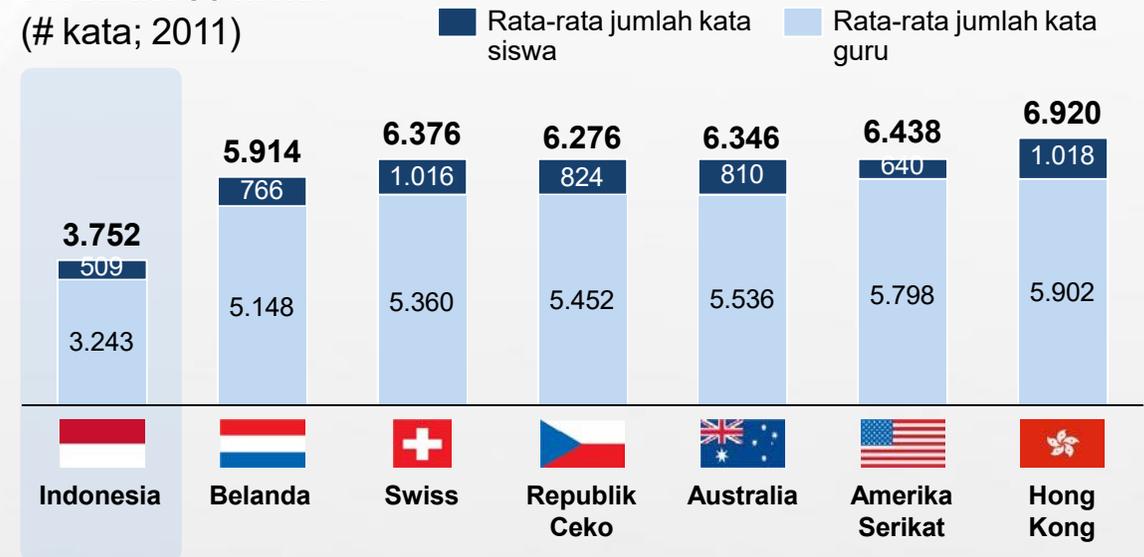
2 A Kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar

Skor Kompetensi Guru (UKG) (% dari 100; 2019)



Rata-rata skor kompetensi guru
57 dari 100

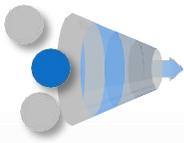
Rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran berdurasi 50 menit (# kata; 2011)



Hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata; jauh lebih rendah dari negara lain sebesar 25-41%

Pertanyaan guru cenderung dangkal karena ~90% jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan kemampuan analisis tinggi (*higher order thinking*)

Infrastruktur sekolah yang tidak memadai menjadi salah satu alasan rendahnya hasil belajar dalam sistem pendidikan dasar dan menengah

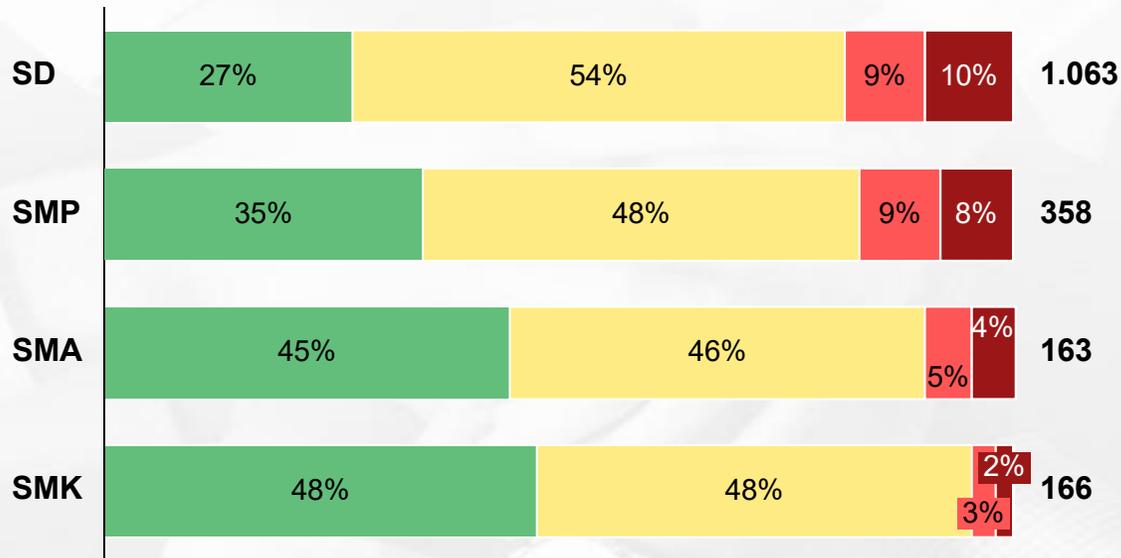


2 B Infrastruktur sekolah yang tidak memadai

Kondisi Ruang Kelas

('000 ruang kelas dan %; 2019)

■ Kondisi Baik
 ■ Rusak Ringan
 ■ Rusak Sedang
 ■ Rusak Berat

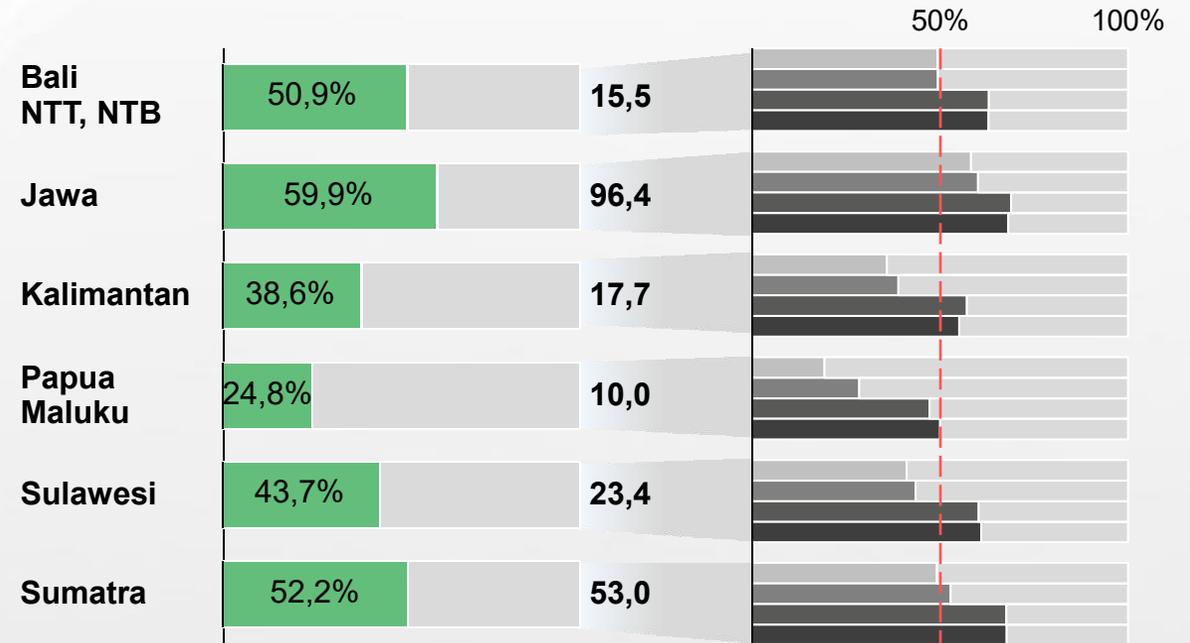


>50% sekolah di Indonesia **setidaknya rusak ringan**

Akses Internet Sekolah

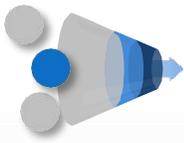
(% dan '000 sekolah; 2019)

■ SD
 ■ SMP
 ■ SMA
 ■ SMK



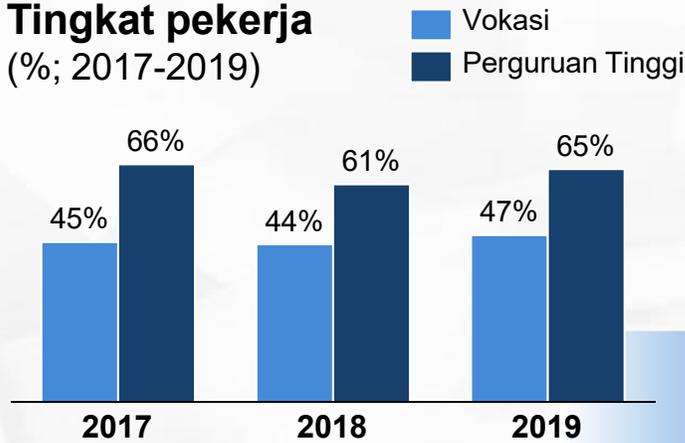
>40% dari seluruh sekolah **tidak memiliki akses internet**, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD)

Kurang memadainya hasil pembelajaran pendidikan tinggi disebabkan masalah kualitas pengajar, kurikulum/program, dan kolaborasi industri



2 Tren dan permasalahan pendidikan tinggi

Tingkat pekerja (%; 2017-2019)



QS Peringkat Universitas di Dunia (#; 2020)

 **Universitas Indonesia**
Peringkat #296

 **Institut Teknologi Bandung**
Peringkat #331

 **Universitas Gajah Mada**
Peringkat #320

 **Institut Pertanian Bogor**
Peringkat #600-650

Masalah Utama

Keterlibatan industri yang rendah

Peraturan dan persyaratan yang ketat

Kurikulum yang kaku

Kesenjangan yang mencolok dalam kompetensi dosen

- Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum dan penguatan kompetensi mahasiswa hanya terbatas pada segelintir sekolah kejuruan dan perguruan tinggi
- Program magang/magang terstruktur terbatas

- Dosen diharuskan untuk mengikuti pembagian alokasi Tridharma tanpa memandang preferensi/kompetensi
- Promosi untuk dosen (baik negeri maupun swasta) harus disetujui oleh kementerian
- Akreditasi difokuskan pada administrasi dan keseragaman

- Tidak ada persyaratan dan seleksi program interdisipliner yang terintegrasi dengan program utama
- Kurikulum pelatihan ganda pendidikan vokasi (TVET) yang terbatas untuk mempersiapkan angkatan kerja generasi berikutnya

- Rekrutmen difokuskan pada kualifikasi akademik, alih-alih kompetensi/pengalaman industri
- Terbatasnya pengalaman dosen di luar kampus
- 50% dosen lulus dari universitas tempat mereka mengajar (*in-breeding*)

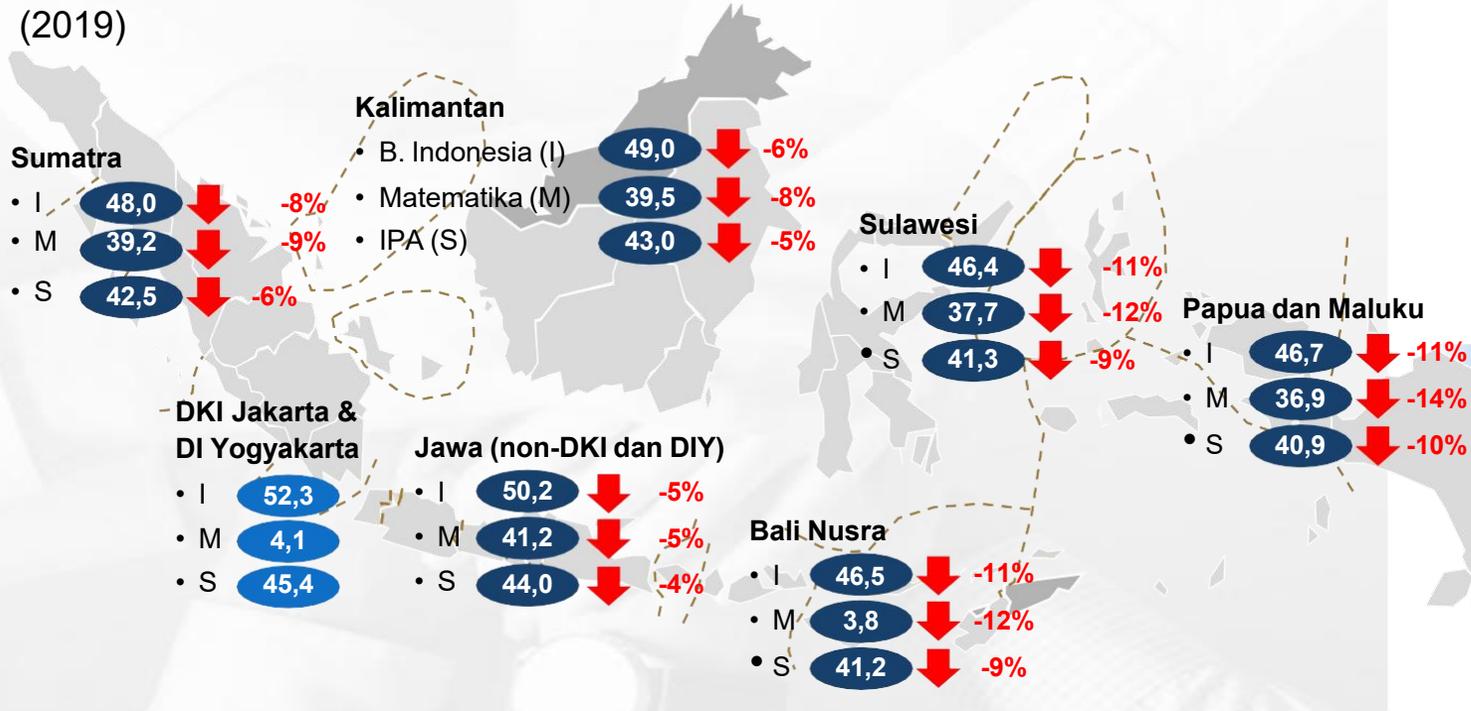
Ketimpangan kualitas terlihat antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia



3 Tren dan permasalahan distribusi kualitas yang merata

Persebaran Skor AKSI (2019)

(2019)



Masalah Utama

Kesenjangan Pemerintahan

Batasan Peraturan

Lanjutan...

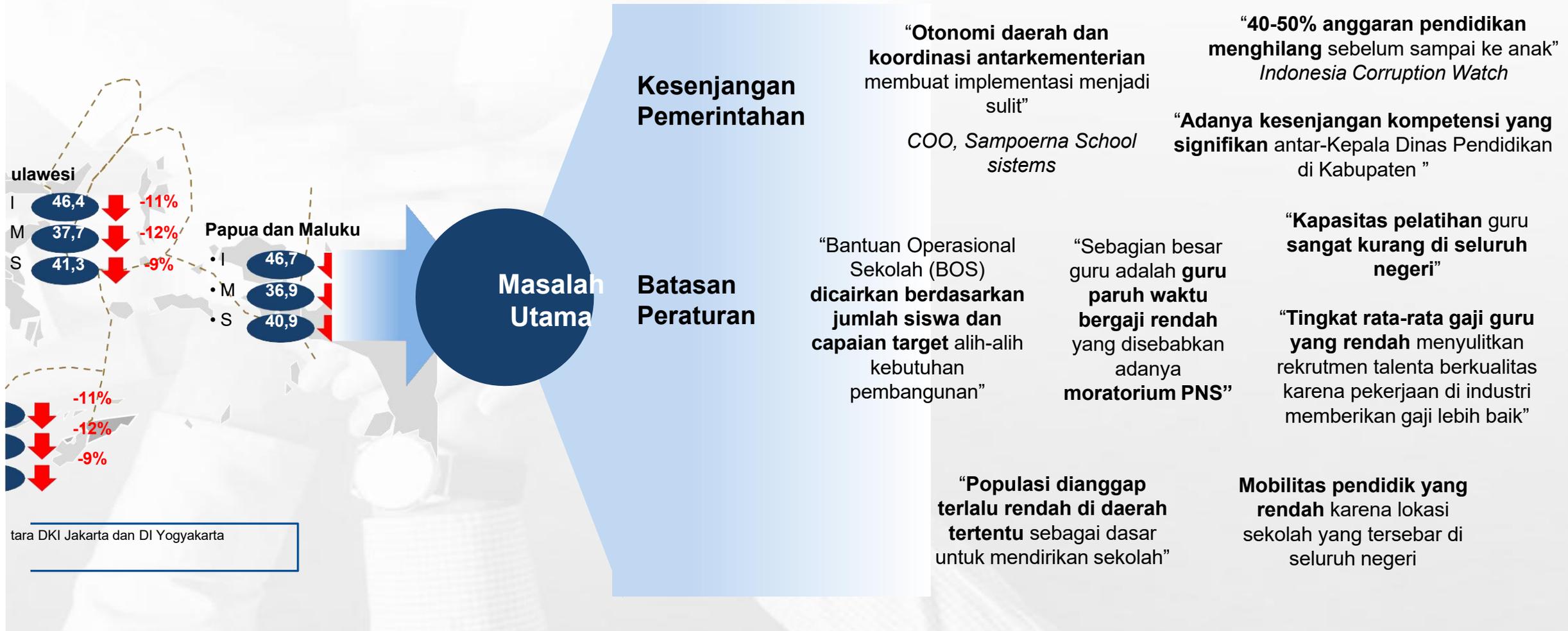
Legenda: **xx** Skor AKSI (SMP) ↓ **xx** % perbedaan rata-rata skor AKSI antara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

Besarnya ketimpangan hasil belajar antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia

Ketimpangan kualitas disebabkan keterbatasan pemerintahan, peraturan, dan geografis



Tren dan permasalahan distribusi kualitas yang merata





AGENDA

- 1 Informasi Pendidikan di Indonesia
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar
- 3 Advokasi Kebijakan
- 4 Manajemen Perubahan
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif
- 6 Rangkuman

SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila



Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistic dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja

Merdeka Belajar

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan (termasuk siswa) menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya

Pendidikan Berkualitas Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Organisasi Penggerak, Perusahaan Teknologi Edukasi, dll

“Sekolahkan Anak Indonesia”

Angka Partisipasi Tinggi
>95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi

“Dorongan Pembelajaran Siswa”

Hasil Belajar Berkualitas
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90% tingkat penempatan kerja

“Tidak Ada Anak yang Tertinggal”

Distribusi yang Merata
baik secara geografis maupun status sosial ekonomi

dapat dicapai melalui perbaikan pada:

Infrastruktur dan Teknologi

Kebijakan, Prosedur, dan Pendanaan

Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya

Kurikulum, Asesmen, dan Pedagogi



- Kesadaran/ Persepsi
- Akses
- Keterjangkauan
- Tekanan eksternal

1 **Tingginya angka partisipasi siswa**

- Kurikulum dan program
- Pola pikir dan 'agen siswa'
- Infrastruktur
- Pedagogi
- Penilaian
- Ekosistem

2 **Hasil pembelajaran yang berkualitas**

- Geografis
- Budaya dan/atau sosioekonomi
- Infrastruktur
- Pemerintahan
- Pembiayaan

3 **Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif**



Masyarakat Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila:

- 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia**
- 2. Berkebinekaan Global**
- 3. Bergotong royong**
- 4. Kreatif**
- 5. Bernalar kritis**
- 6. Mandiri**



“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya **budi pekerti, pikiran** dan **tubuh anak**. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita”.

“Pendidikan dan pengajaran idealnya **memerdekakan** manusia secara lahiriah dan batiniah, selalu relevan untuk segala jaman.”

***“Target kita bukan sekadar pemerataan akses,
tetapi akses yang berkualitas”***

sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan .

“Pendidikan adalah **usaha sadar** dan **terencana** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif **mengembangkan potensi dirinya** untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1)

Proses Kebijakan Pendidikan menjadi penting dalam sebuah analisis kebijakan publik karena dengan proses analisis kebijakan pendidikan kita dapat mengetahui bagaimana sebuah proses kebijakan publik dapat dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) itu berjalan. Sementara dalam proses pembuatan dan menjalankan sebuah kebijakan, masalah kebijakan sangat mungkin hadir dalam isu permasalahan tertentu. dimana masalah-masalah kebijakan yang muncul memiliki karakteristik atau ciri saling ketergantungan, subjektif, artifisial dan ketidakstabilan.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk **berkembangnya potensi peserta didik** agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Untuk mencapai Visi Pendidikan Indonesia, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar di bidang pendidikan (per-Jan 2023 sudah ada 22 episode kebijakan)

MB 1

Penggantian UN

MB 2

Kampus Merdeka

MB 3

Penyesuaian Kebijakan
Dana BOS

MB 4

Program Organisasi
Penggerak

MB 5

Guru Penggerak

MB 6

Transformasi Dana
Pemerintah untuk Pendidikan
Tinggi

MB 7

Program Sekolah
Penggerak

MB 8

SMK Pusat Keunggulan

MB 9

KIP Kuliah Merdeka

MB 10

Perluasan Program
Beasiswa Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

MB 11

Kampus Merdeka Vokasi

MB 12

Sekolah Aman
Berbelanja dengan SIPLah

MB 13

Merdeka Berbudaya
dengan Kanal Indonesiana

MB 14

Kampus Merdeka dari
Kekerasan Seksual

MB 15

Kurikulum Merdeka dan
Platform Merdeka Mengajar

MB 16

Akselerasi dan Pendanaan
Satuan Pendidikan Tahun 2022

MB 17

Revitalisasi
Bahasa Daerah

MB 18

Merdeka Berbudaya
dengan Dana Indonesiana

MB 19

Rapor Pendidikan
Indonesia

MB 20

Praktisi Mengajar

MB 21

Dana Abadi Perguruan Tinggi

MB 22

Transformasi seleksi masuk PT

MB XX

Episode merdeka belajar lainnya



Seluruh kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk mentransformasi satuan pendidikan agar layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia

Satuan pendidikan berpihak kepada murid



Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi

Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif



Hasil belajar murid harus terus mengalami peningkatan, terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi dan karakter



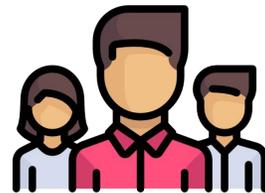
Terdapat 4 transformasi untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia

Infrastruktur
dan
Teknologi



Kebijakan,
Prosedur, dan
Pendanaan

Kepemimpinan,
Masyarakat,
dan Budaya



Kurikulum,
Pedagogi, dan
Asesmen

57% episode Merdeka Belajar berkaitan dengan Ditjen Pauddasmen



Merdeka Belajar 1

Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB



Merdeka Belajar 2

Kampus Merdeka



Merdeka Belajar 3

Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS



Merdeka Belajar 4

Program Organisasi Penggerak



Merdeka Belajar 5

Guru Penggerak



Merdeka Belajar 7

Program Sekolah Penggerak



Merdeka Belajar 10

Perluasan Program Beasiswa LPDP



Merdeka Belajar 12

Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah



Merdeka Belajar 13

Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana



Merdeka Belajar 16

Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan



Merdeka Belajar 17

Revitalisasi Bahasa Daerah



Merdeka Belajar 19

Rapor Pendidikan Indonesia

<http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/>

Penjelasan Merdeka Belajar (1 dari 5)



Merdeka Belajar 1

Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB

- UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
- USBN menjadi ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing
- Penyederhanaan RPP
- Perubahan kebijakan PPDB zonasi



Merdeka Belajar 2

Kampus Merdeka

- Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B
- Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi
- Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)
- Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)**

Penjelasan Merdeka Belajar (2 dari 5)



Merdeka Belajar 3

Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

- Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah
- Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah
- Nilai Satuan BOS meningkat
- Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel



Merdeka Belajar 4

Program Organisasi Penggerak

Peningkatan SDM sekolah yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dengan kategori tertentu berdasar rekam jejak dan kompetensi organisasi



Merdeka Belajar 5

Guru Penggerak

Pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya sehingga guru berperan sebagai agen teladan dan obor perubahan



Merdeka Belajar 7

Program Sekolah Penggerak

Transformasi sekolah berkualitas melalui SDM sekolah yang unggul dengan melakukan 5 intervensi

Penjelasan Merdeka Belajar (3 dari 5)



Merdeka Belajar 10

Perluasan Program Beasiswa LPDP

- a. Kemendikbud dan LPDP berkolaborasi memperluas ruang lingkup Dana Abadi Pendidikan untuk program yang sudah tersedia dan program baru di tahun 2021
- b. LPDP mendukung Program Kampus Merdeka, Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Mobilitas Internasional Mahasiswa



Merdeka Belajar 12

Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah

- a. Pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi
- b. Mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta:
 - Transparansi dan Akuntabilitas
 - Efisiensi anggaran
 - Beragamnya opsi penyedia

Penjelasan Merdeka Belajar (4 dari 5)



Merdeka Belajar 15

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih :

1. Kurikulum 2013 secara penuh
2. Kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan)
3. Kurikulum Merdeka

Dukungan penerapan kurikulum merdeka:

1. Penyediaan perangkat ajar (buku Teks dan bahan ajar pendukung)
2. pelatihan dan penyediaan sumber belajar
3. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru



Merdeka Belajar 16

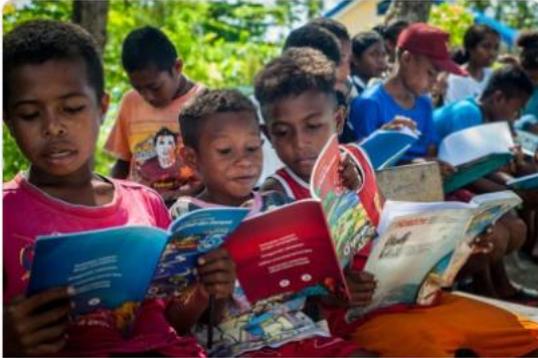
Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), BOP Kesetaraan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

- Nilai Satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah
- Penyaluran BOP PAUD dan BOP kesetaraan langsung ke satuan pendidikan
- Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel
- Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal

Penjelasan Merdeka Belajar (5 dari 5)

Banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah dan dalam kondisi kritis sehingga diluncurkan revitalisasi bahasa daerah dan kelompok tutur.



Merdeka Belajar 17

Revitalisasi Bahasa Daerah



Merdeka Belajar 19

Rapor Pendidikan Indonesia

1. Diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah mempelajari kondisi masing - masing dan melakukan perbaikan
2. Menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data pendukung lain ke dalam satu tampilan terintegrasi
3. Mencakup area yang berkaitan dengan input, output dan proses pembelajaran.



AGENDA

- 1 Informasi Pendidikan di Indonesia
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar
- 3 **Advokasi Kebijakan**
- 4 Manajemen Perubahan
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif
- 6 Rencana Kerja

POINT KEBIJAKAN PENDIDIKAN

- 1 Pembangunan Pendidikan Nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik
- 2 Pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas harkat, dan martabat setiap warga Negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat
- 3 Pendidikan sebagai human investment yang mempunyai perspektif multidimensional
- 4 Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga mengukuhkan ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama sehingga dapat memantapkan keutusan nasional



POINT KEBIJAKAN PENDIDIKAN

- 5 Pembangunan Pendidikan Nasional memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa
- 6 Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu yang mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan
- 7 Salah satu intervensi utama; pendampingan asimetris dan konsultatif yang dilakukan melalui UPT Kemdikbudristek kepada Pemerintah Daerah





Faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan

- 1 Kualitas substansi kebijakan yang telah dirumuskan
- 2 Kejelasan rumusan masalah dan alternative solusi/opsi kebijakan
- 3 Sumber daya potensial yang mendukung
- 4 Kemampuan dan kemauan user/pelaksana kebijakan
- 5 Dukungan dari pemangku kepentingan terkait
- 6 Efektifitas dan efisiensi birokrasi



AGENDA

- 1 Informasi Pendidikan di Indonesia
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar
- 3 Advokasi Kebijakan
- 4 **Manajemen Perubahan**
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif
- 6 Rencana Kerja
- 7

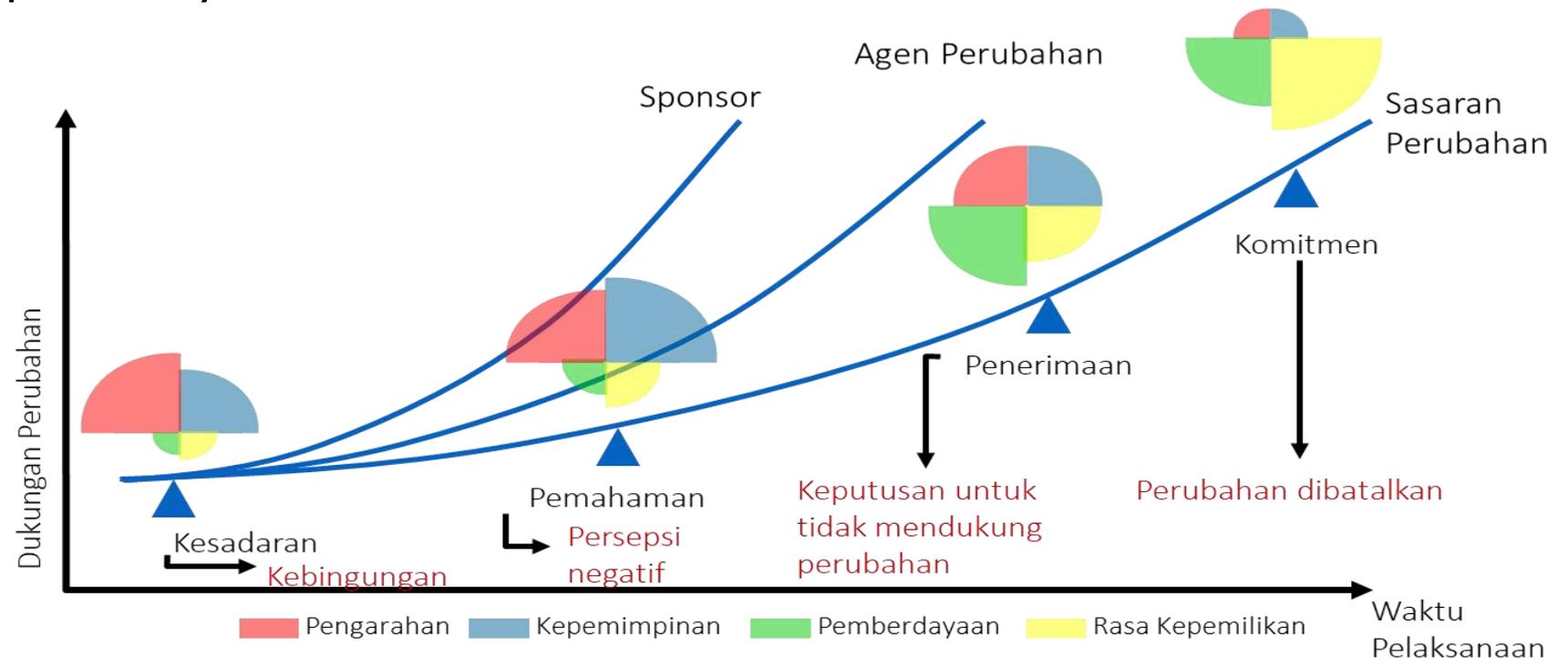


Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis yang berurusan dengan transformasi suatu organisasi, proses atau teknologi

Manajemen Perubahan perlu dilakukan untuk memastikan seluruh **perubahan** yang akan diimplementasikan **didukung, diterima, dan dimiliki** oleh seluruh **pemangku kepentingan**.

Rasa kepemilikan sasaran perubahan berkembang sejalan dengan waktu pelaksanaan dimana pengarah dan kepemimpinan semakin mengecil, dan pemberdayaan semakin besar.

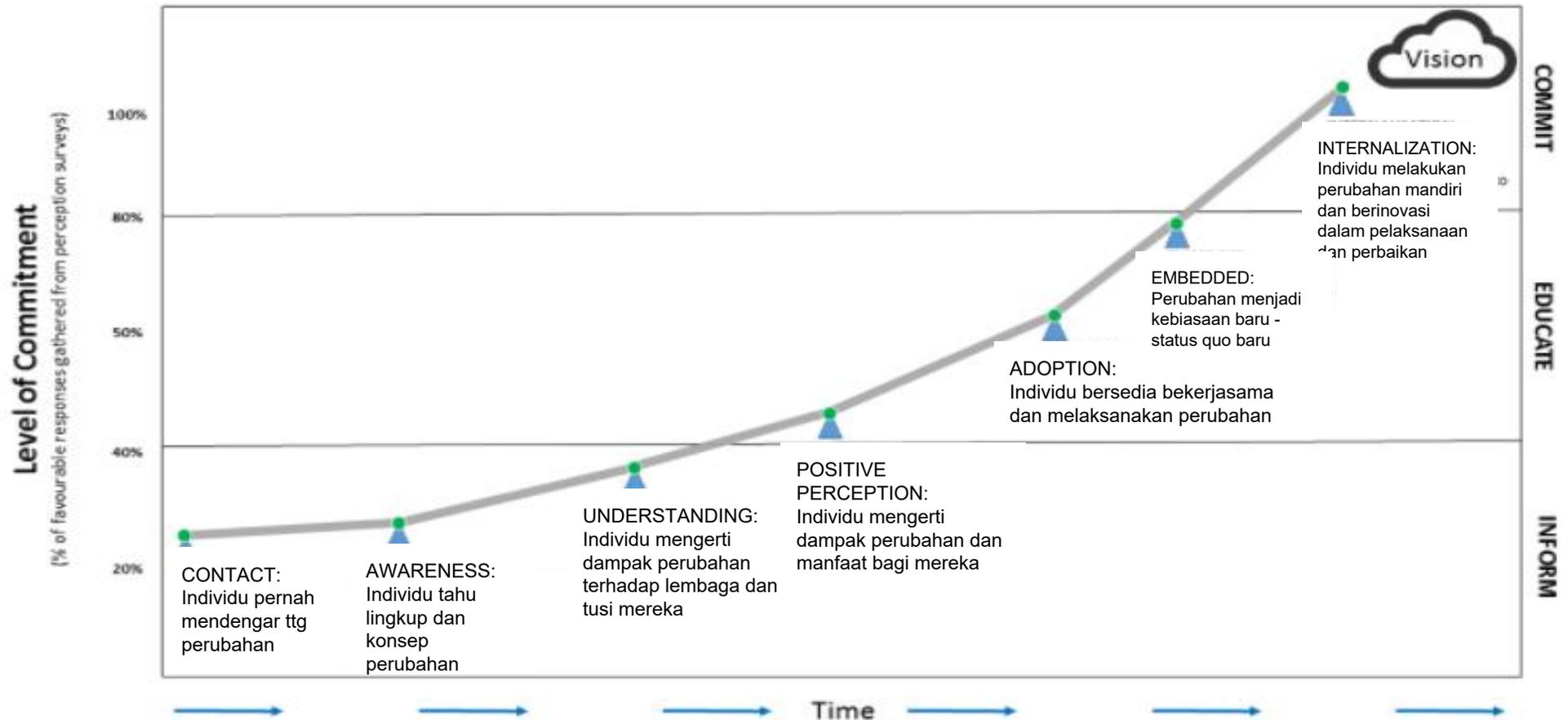
Kurva Manajemen Perubahan





Komitmen merupakan bagian penting dalam perubahan dan perlu dibangun strategi untuk mencapainya agar perubahan dapat terjadi dengan baik

Grafik berikut adalah kurva komitmen yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk mengelola perubahan. Kurva komitmen ini menggambarkan proses perubahan komitmen seseorang



SECARA SEDERHANA MANAJEMEN PERUBAHAN TERDIRI DARI MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN, KOMUNIKASI, DAN PELATIHAN

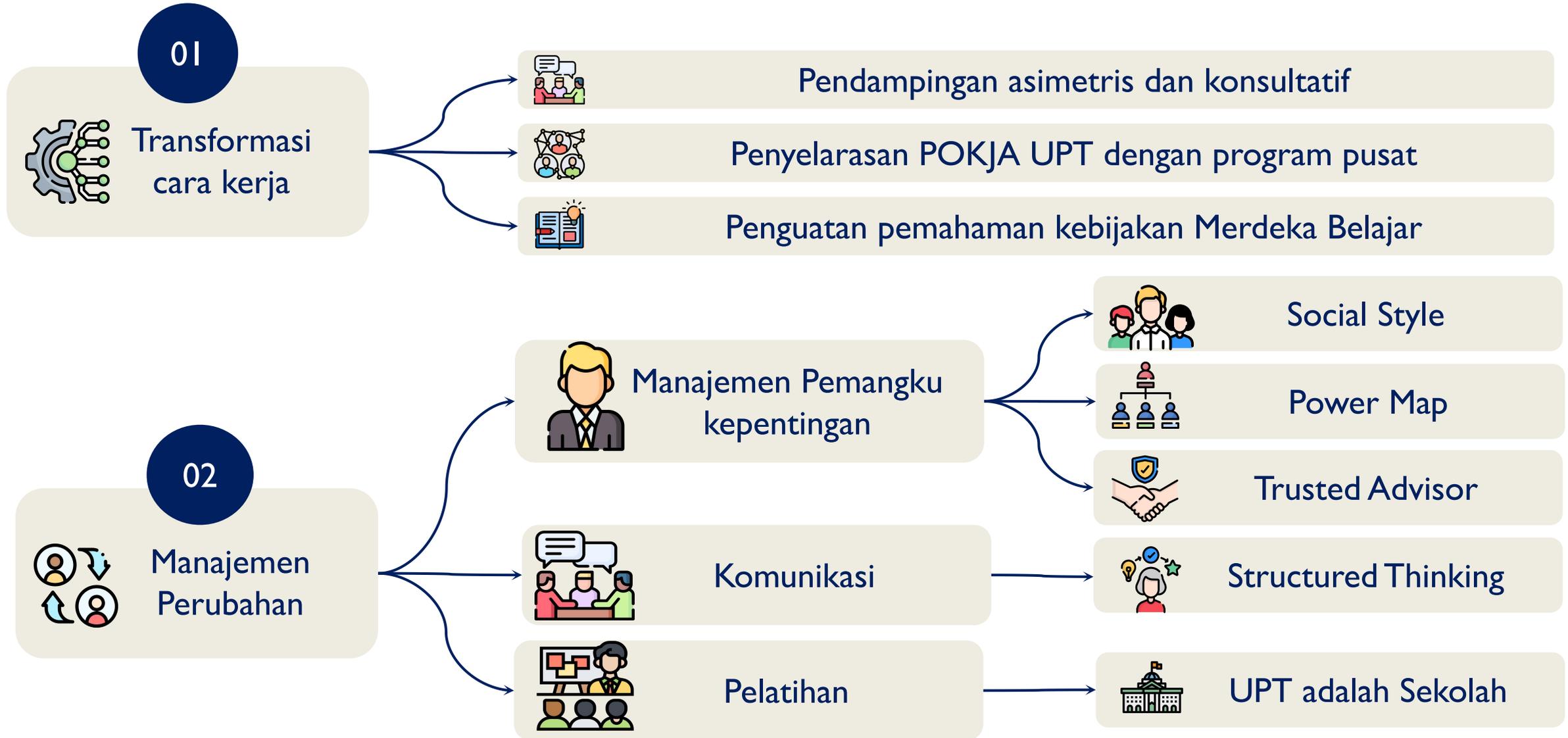
Lakukan Analisa Gap (Gap Analysis) untuk identifikasi pemangku kepentingan (sponsor, agen perubahan, dan sasaran perubahan) , dan Perencanaan Rencana Perubahan.



Rencana kegiatan dari manajemen perubahan

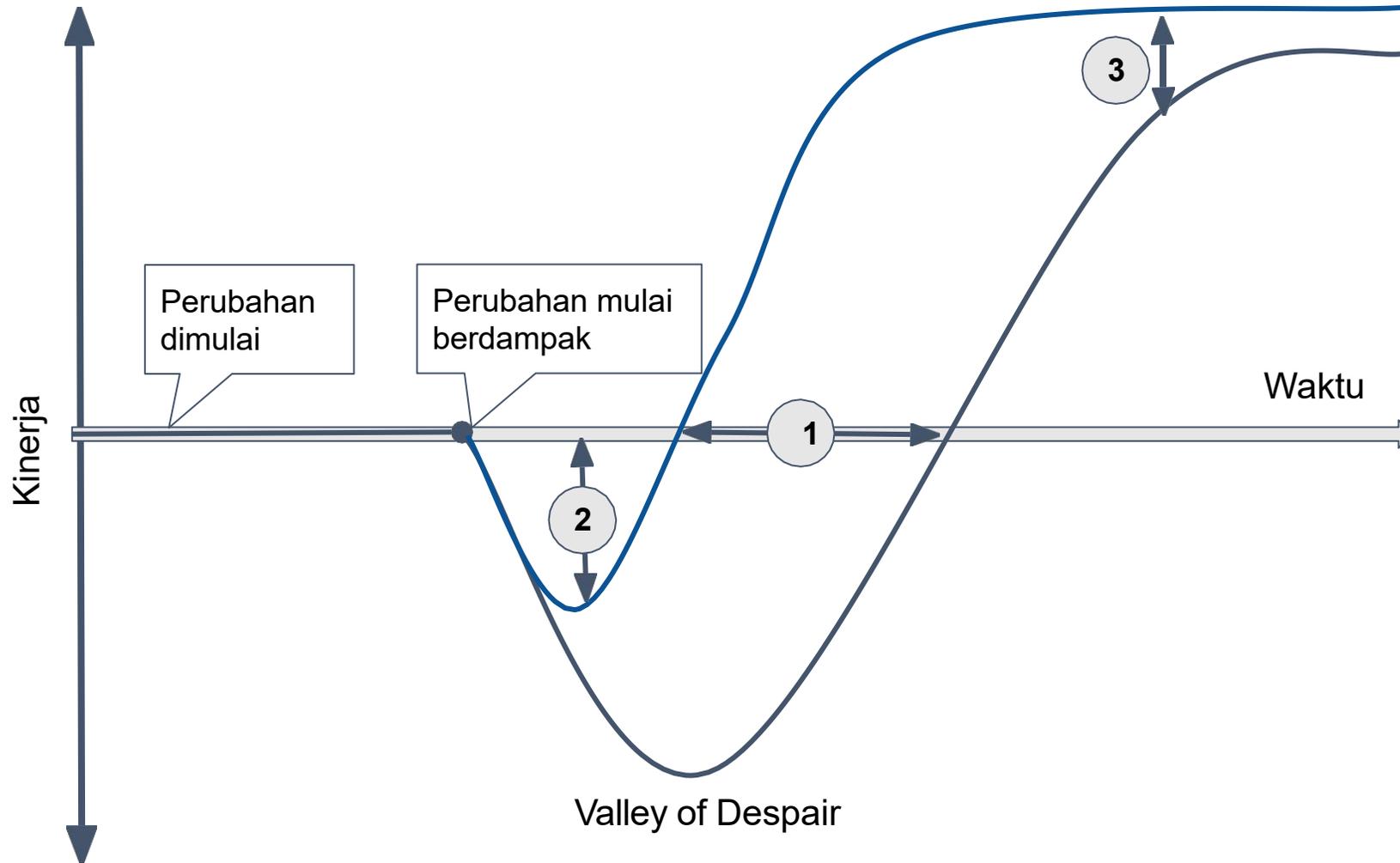
Manajemen Pemangku Kepentingan	Komunikasi	Pelatihan
<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi pemangku kepentingan• Pembuatan rencana kegiatan/jadwal meeting (informal, formal, video call)	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi kanal komunikasi yang efektif (email, web, sosmed, rapat)• Menentukan jenis media komunikasi (poster, infografis, spanduk, flyer, video, dll.)• Pembuatan tema dan materi sosialisasi• Pembuatan rencana kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan• Identifikasi metode pelatihan (classroom, video call, ToT, dll.)• Pembuatan materi pelatihan• Pembuatan jadwal pelatihan

Ditjen PAUD dan Dasmen berperan dalam manajemen perubahan dan transformasi cara kerja Kemendikbudristek *)



*) kondisi yang terjadi di Ditjen Paud dan Dasmen

Saat Advokasi Kebijakan enali “**Manajemen Perubahan**” dalam bersinergi yang baik akan mengurangi durasi dan kedalaman dari *Valley of Despair* dan meningkatkan target kinerja



- 1. Waktu diperpendek** karena manfaat perubahan disadari sejak awal
- 2. Reaksi negatif diminimalisir** dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan sasaran perubahan
- 3. Kinerja meningkat secara signifikan**



AGENDA

- 1 Data/Informasi Mutu Pendidikan**
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar**
- 3 Advokasi Kebijakan**
- 4 Manajemen Perubahan**
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif**
- 6 Rencana Kerja**



Pendampingan Konsultatif dan Asimetris

Pendekatan Konsultatif

UPT berperan sebagai **penunjang, fasilitator, dan konsultan** untuk pemerintah daerah. Tempat Pemda pertama kali bertanya, meminta pendapat, saran dan solusi.

Pendekatan Asimetris

Pendekatan **asimetris** adalah pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap pemerintah daerah yang berbeda.



Mengubah tata kelola organisasi dengan merevitalisasi fungsi UPT

Sebagai mitra daerah, fungsi UPT dikembangkan menjadi 3 yaitu advokasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi,

FUNGSI SEBELUMNYA

1. Fasilitasi, Supervisi & Evaluasi
Melakukan fasilitasi, supervisi satuan pendidikan dan evaluasi pelaksanaan
2. Pengembangan Program/Model
Mengkaji, mengembangkan dan uji coba model pembelajaran PAUD atau program
3. Pengembangan SDM / BIMTEK
Melatih Pendidik & Tenaga Kependidikan
4. Kemitraan dan Kerjasama
Melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang peningkatan mutu
5. Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan
Mengembangkan aplikasi & pemetaan mutu

FUNGSI SAAT INI

I. ADVOKASI
Mempromosikan kebijakan pusat ke Kepala Daerah dan Kepala Dinas

2. PENDAMPINGAN
Memberikan konsultasi (advice) agar kebijakan dapat terimplementasi sesuai kondisi

3. PEMANTAUAN & EVALUASI
Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Daerah

Pelatihan GTK tidak lagi dilakukan oleh PP/BP-PAUD Dikmas, namun dilakukan oleh Balai Guru Penggerak (BGP)

Kemitraan dan Kerjasama dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Sentralisasi pengembangan aplikasi di Pusdatin
Pemetaan Mutu digantikan dengan Profil Pendidikan



Terdapat 2 isu utama penyebab pelaksanaan kebijakan pendidikan Pusat belum berjalan lancar dan merata di Daerah

Isu	Tantangan	Rencana Perbaikan
<p>1. Mekanisme koordinasi, proses, struktur organisasi, dan SDM UPT belum efektif untuk menyelaraskan koordinasi antara Pusat dan Daerah</p>	<p>1.1. Koordinasi Peningkatan Mutu Kemdikbud dan UPT* bersifat vertikal langsung ke Sekolah dan Dinas Pendidikan tanpa melibatkan Kepala Daerah dan DPRD</p> <p>1.2. Beberapa Tusi UPT kurang menunjang koordinasi Pusat-Daerah</p> <p>1.3. SDM UPT kurang menunjang koordinasi Pusat-Daerah</p>	<p>1.1. Mengubah mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah</p> <p>1.2. Mengubah tata kelola organisasi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merevitalisasi fungsi UPT b. merestrukturisasi organisasi UPT <p>1.3. Penguatan SDM organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kompetensi • Asemen, pengadaan dan • Pelatihan
<p>2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan belum berjalan efektif</p>	<p>2.1. Instrumen kurang efisien dan bersifat subjektif</p> <p>2.2. Kompensasi yang tidak signifikan sehingga motivasi Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan rendah</p>	<p>2.1. Membuat Profil/Rapor Pendidikan terintegrasi antara Pusat dan Daerah, otomatis dan objektif (data driven)</p> <p>2.2. Berbagai mekanisme perlu dilakukan untuk memotivasi daerah dalam peningkatan mutu</p>

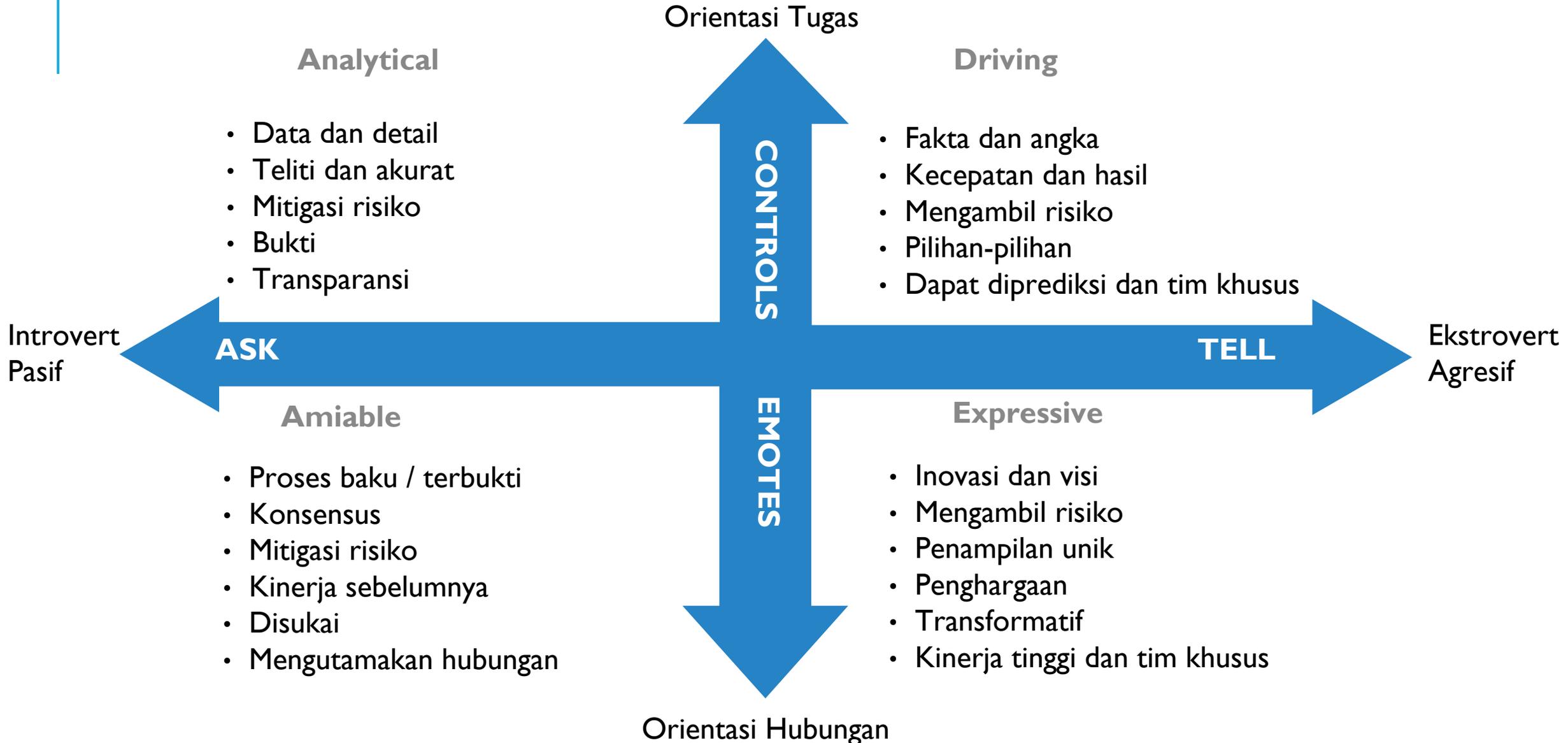
*UPT: BBPMP dan BPMP

PENTINGNYA MEMAHAMI SOCIAL STYLE PADA SAAT MELAKUKAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN ASIMETRIS

Social style adalah **perilaku** yang ditunjukkan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain.

Menyadari *social style* membantu kita untuk **membangun hubungan baik** dengan orang lain.

JENIS *SOCIAL STYLE* MEMBERIKAN WAWASAN TENTANG KARAKTER DARI PEMANGKU KEPENTINGAN



SIKAP BERDASARKAN *SOCIAL STYLE*



AGAR DAPAT BERHUBUNGAN DENGAN BAIK DENGAN ORANG LAIN, KITA PERLU MELAKUKAN *FLEXING* ATAU MENYESUAIKAN *SOCIAL STYLE* KITA

Analytical

- Jangan terburu-buru
- Jangan membuang waktu
- Jawab semua pertanyaan
- Berikan bukti nyata dan solid
- Jangan memaksa (*hard sell*)
- Jangan berjanji yang berlebihan (*over promise*)

Driver

- Cepat, langsung keintinya (*to the point*)
- Gunakan fakta, bukan emosi
- Jelas, singkat, ringkas
- Jangan buang waktu
- Tawarkan opsi dengan data pendukung yang ringkas

Amiable

- Santai, kecepatan sedang
- Aktif mendengar
- Kenali mereka
- Tunjukkan ketertarikan pribadi
- Minta masukan / reaksi mereka

Expressive

- Bersemangat, ceria, cepat
- Biarkan mereka bicara
- Berikan waktu untuk bersosialisasi
- Izinkan bicara menyimpang / topik lain
- Berikan pilihan-pilihan
- Fokus pada gambaran besar



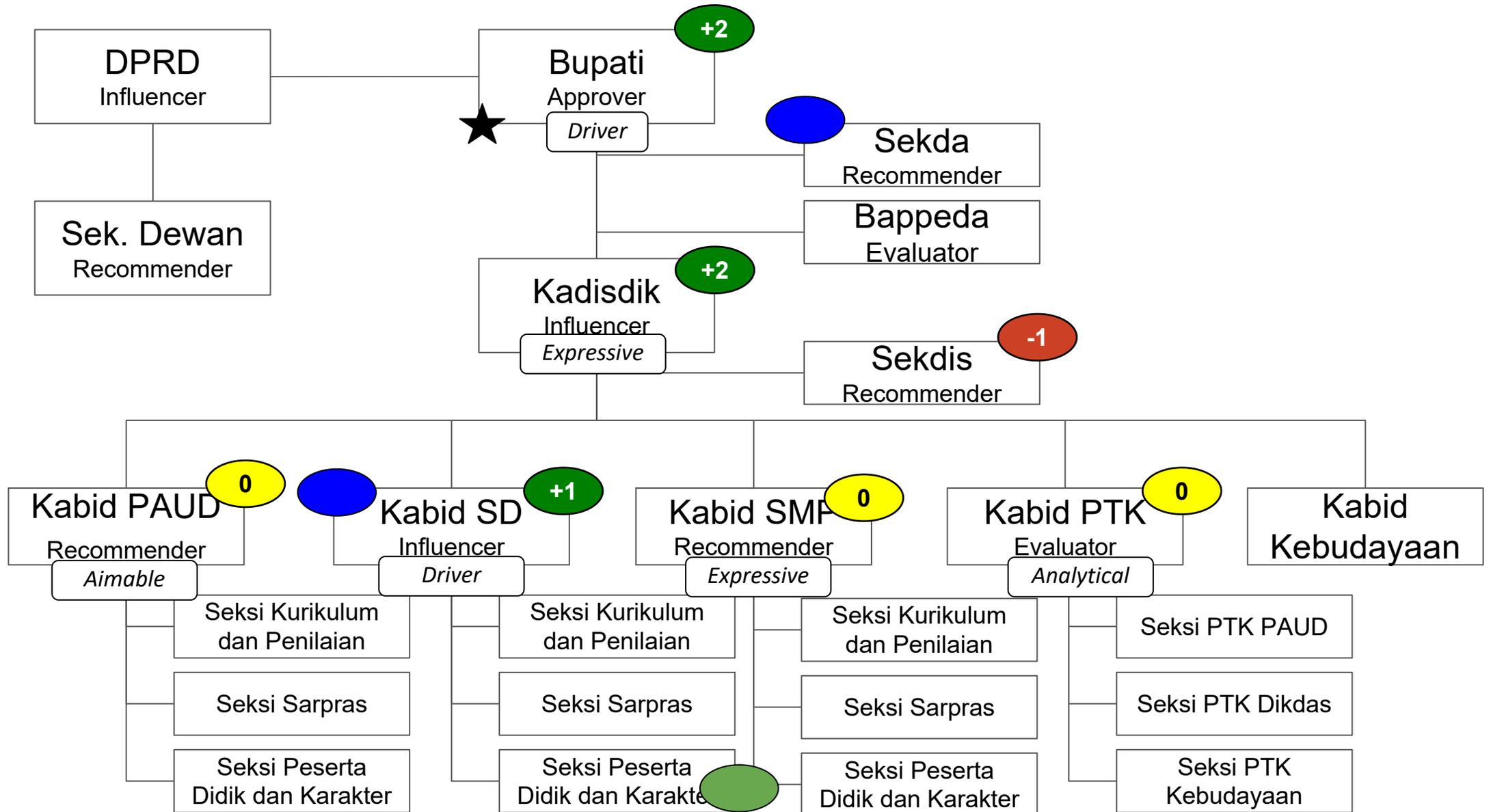
Power Map membantu kita dalam;

1. Memberikan informasi penting untuk membangun strategi berhubungan dengan pemangku kepentingan agar mendapatkan dukungan dan komitmen
2. Membuat rencana bagaimana menavigasi dan memanfaatkan informasi tersebut

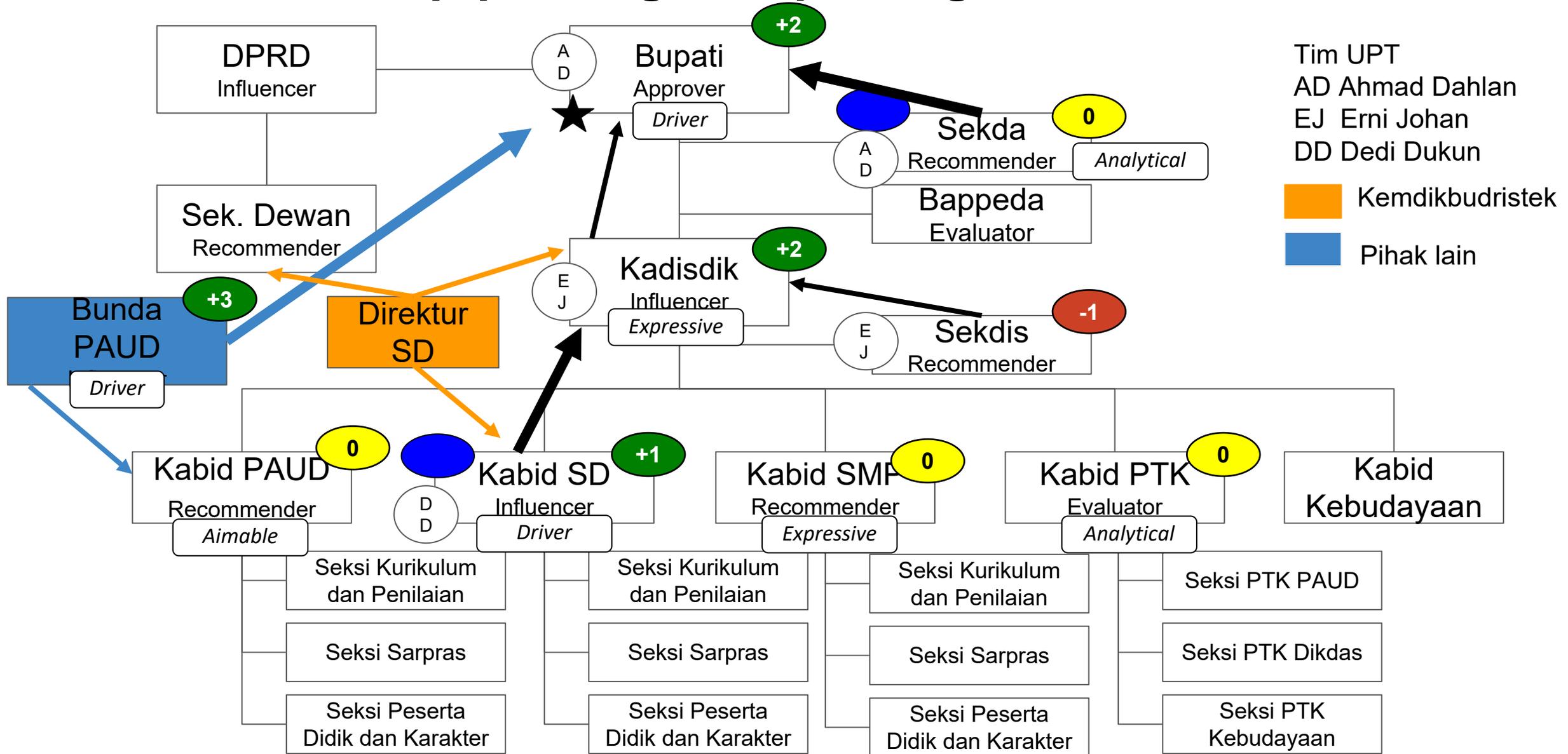
Peranan pemangku kepentingan

Evaluators	Orang yang menilai kebijakan / MoU/ Nota Kesepakatan
Recommenders	Orang yang memberikan rekomendasi
Approvers	Orang yang menyetujui rekomendasi
Influencers	Orang yang mempengaruhi keputusan orang lain
Coaches	Orang yang memberikan / diminta nasehat / saran

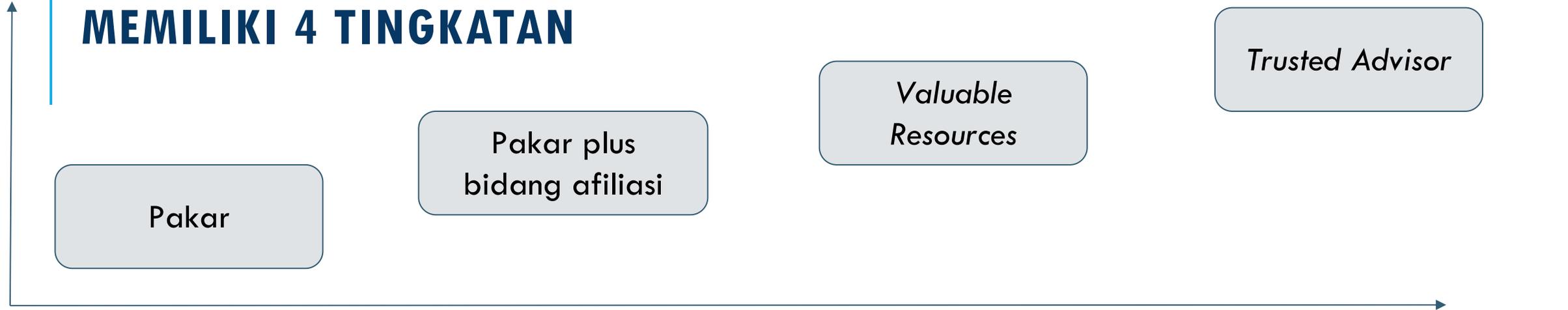
Contoh peta hubungan pemangku kepentingan



Contoh *Power Map* pemangku kepentingan



HUBUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN MEMILIKI 4 TINGKATAN



- Tugas spesifik, satu jenis

- Menyelesaikan masalah pada lingkup terbatas

- Pelayanan berbasis jasa

- Memiliki kemampuan tidak hanya di bidangnya

- Menyelesaikan masalah secara umum tidak hanya bidang yang dikuasai.

- Berbasis kebutuhan

- Diminta konsultasi pada isu strategis yang lebih luas yang berkaitan dengan bidang keahlian

- Menawarkan advis secara proaktif dan mengidentifikasi isu klien

- Berbasis hubungan

- Diskusi dan eksplorasi semua isu, baik personal maupun profesional

- Yang pertama kali dihubungi klien saat isu pertama muncul, seringkali dalam kondisi mendesak.

- Berbasis percaya

KEPERCAYAAN DIPENGARUHI OLEH KOMPONEN KREDIBILITAS, KEANDALAN, KEDEKATAN, DAN ORIENTASI DIRI

$$T = \frac{C + R + I}{S}$$

T (Trustworthiness)	Kepercayaan		Dimensi	Karakteristik negatif
C (Credibility)	Kredibilitas		Perkataan	Omong kosong
R (Reliability)	Keandalan		Perbuatan	Tidak bertanggungjawab
I (Intimacy)	Kedekatan		Emosi	Kaku, teknikal
S (Self-orientation)	Orientasi diri		Motif	Licik

Intimacy dengan nilai rendah, dan *Self-orientation* dengan nilai tinggi, merupakan elemen utama yang membuat nilai hubungan rendah - alasan terbesar dari keberhasilan dan kegagalan dalam berhubungan

PERBEDAAN PMO PDM, POKJA PDM dan POKJA UPT PDM

PMO PDM

1. PMO PDM adalah *Project Management Office*, yaitu Pokja yang dikelompokkan lintas jenjang, dengan Supervisor, PIC, dan anggota dari Pokja PDM yang ada di masing-masing Direktorat.
2. Difokuskan pada program Kebijakan Merdeka Belajar
3. Terbagi menjadi 13 PMO PDM (th. 2023)
4. Diperlukan karena program-program prioritas membutuhkan koordinasi yang erat dan berkesinambungan lintas satuan kerja, lintas unit utama, bahkan lintas kementerian lembaga;
5. Mendorong kepemimpinan kolektif yang lebih kolaboratif dan egaliter, dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks secara efektif dan efisien;
6. Mendorong munculnya *agents of change* secara lebih fleksibel, yang dapat menjadi calon pemimpin masa depan dalam organisasi Kemendikbudristek;
7. Meningkatkan kekompakan, kebersamaan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar pada Ditjen Paudnasmen dan UPT PDM. dan
8. Meningkatkan kecepatan dan keefektifan penggunaan sumber daya

POKJA PDM

1. Pokja yang ada di satker PDM Pusat dan anggotanya di satker masing-masing
2. Terdiri dari 5 Pokja
3. Memudahkan penyelesaian berbagai program Pokja PDM dan Kebijakan Program Merdeka Belajar di Direktorat dan PMO PDM.

POKJA UPT PDM

1. Pokja yang dibentuk di UPT PDM dengan anggota dari UPT masing-masing
2. Terdiri dari 4 Pokja
3. Memfokuskan penyelesaian program kerja UPT terkait kebijakan merdeka belajar
4. Melakukan koordinasi dengan PMO PDM dalam mengadvokasi program Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemerintah Daerah

CONTOH KONTEN ADVOKASI KEPADA PEMDA MENGENAI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Tujuan advokasi:

- Meningkatnya tingkat komitmen pemda (anggaran, perda turunan, SDM pendampingan dan monev)
- Kebijakan pusat dilanjutkan oleh pemda

Kebijakan	Tujuan	Luaran
MB02 - Kampus Merdeka	Memberdayakan mahasiswa meningkatkan SDM sekolah sebagai bagian mata kuliah diluar prodi	Jumlah PTK yang mendapat pelatihan
MB05 - Guru Penggerak	Pengembangan kompetensi guru menjadi pemimpin pembelajaran, profesionalisme dan agen perubahan	Jumlah guru penggerak yang menjadi KS atau pengawas

Seluruh kebijakan pusat yang berhasil meningkatkan mutu layanan pendidikan perlu dilanjutkan oleh pemda. Pemda mempelajari dan turut menerapkan kebijakan pusat, dan **berangsur-angsur mengambil alih penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya.**



AGENDA

- 1 Informasi Pendidikan di Indonesia**
- 2 Episode Kebijakan Merdeka Belajar**
- 3 Advokasi Kebijakan**
- 4 Manajemen Perubahan**
- 5 Pendampingan Asimetris dan Konsultatif**
- 6 Rencana Kerja**

RENCANA KERJA (Suatu Contoh pada Ditjen Pauddasmen)

Pelibatan sumber daya secara optimal, bersinergi, memberikan akses yang tinggi, memberikan kesempatan untuk “belajar dan berkarya”

No	Nama PDM	Supervisor	Koordinator
PDM-01	Program Sekolah Penggerak	Winner Jihad Akbar	Katman (Setdj)
PDM-02	Implementasi Kurikulum Merdeka	Aswin Wihdiyanto	Henny Harsian (SMP) Pembelajaran: Devy Fadly Kurniawan (SMA) Profil Prlajar Pancasila; Maulani Mega Hapsari
PDM-03	Transformasi Digital	I Nyoman Rudi Kurniawan	SDS: Nandana (Setdj)
PDM-04	Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data	Winner Jihad Akbar	RP:Vidy Binsar (SMA) PBD Satpen: Lanny Anggraeni (SD) PBD Pemda: Nandana (Setdj)
PDM-05	Kemitraan daerah	Muhammad Hasbi	Nilam Suri (SD)
PDM-06	Asesmen Nasional	I Nyoman Rudi Kurniawan	Elly Wismayanti (SMP)
PDM-07	Publikasi dan Komunikasi	Komalasari	Wulandoro Santoso (Setdj)
PDM-08	Regulasi dan Transformasi Tata Kelola	Sutanto	Any Sayekti (Setdj)
PDM-09	Transisi PAUD-SD	Komalasari	Dona Paramita (PAUD)
PDM-10	Pemulihan Pembelajaran	Muhammad Hasbi	Sulastri (SMP)
PDM-11	Gerakan Sekolah Sehat	Muhammad Hasbi	Retno Wulandari (PAUD)
PDM-12	Transformasi Pendidikan Khusus	Aswin Wihdiyanto	Meike Anastasia (PMPK)
PDM-13	Transformasi Organisasi	Sutanto	Zimmy Zulkarnaen (Setdj)

REFLEKSI BERTUJUAN MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN PROSES KERJA DEMI OPTIMALISASI HASIL

Aksi Refleksi



1. Hal-hal yang telah berjalan efektif

Mengidentifikasi dan **mengapresiasi** proses kerja yang telah berjalan efektif



2. Problem Statement

Mendiskusikan **kendala atau hambatan yang menyebabkan** proses pelaksanaan program kerja **belum berjalan efektif**



3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan

Mendiskusikan proses kerja yang perlu **ditingkatkan** (Kecepatan, frekuensi)



4. STOP

Mendiskusikan hal-hal yang sebaiknya tidak perlu dilanjutkan <stop> (karena bersifat kontraproduktif)



5. INOVASI

Mendiskusikan hal-hal baru (bersifat inovasi) yang perlu dilakukan



6. RTL (Rencana Tindak Lanjut

Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil refleksi

KEBIASAAN YANG PERLU DILAKUKAN UPT UNTUK MENDUKUNG UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN

1

Melakukan **pengimbasan** ke pegawai internal UPT dan **menerapkan** dalam kegiatan sehari-hari

2

Melakukan **belajar secara mandiri** terkait program Merdeka Belajar di <http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/>

3

Membangun **hubungan yang baik dengan Pemda** menggunakan *social style / power map*

4

Melakukan pengimbasan Merdeka Belajar ke Pemda **secara mandiri**

5

Melakukan advokasi Pemda **tanpa menunggu** surat pengantar/surat edaran dari pusat

6

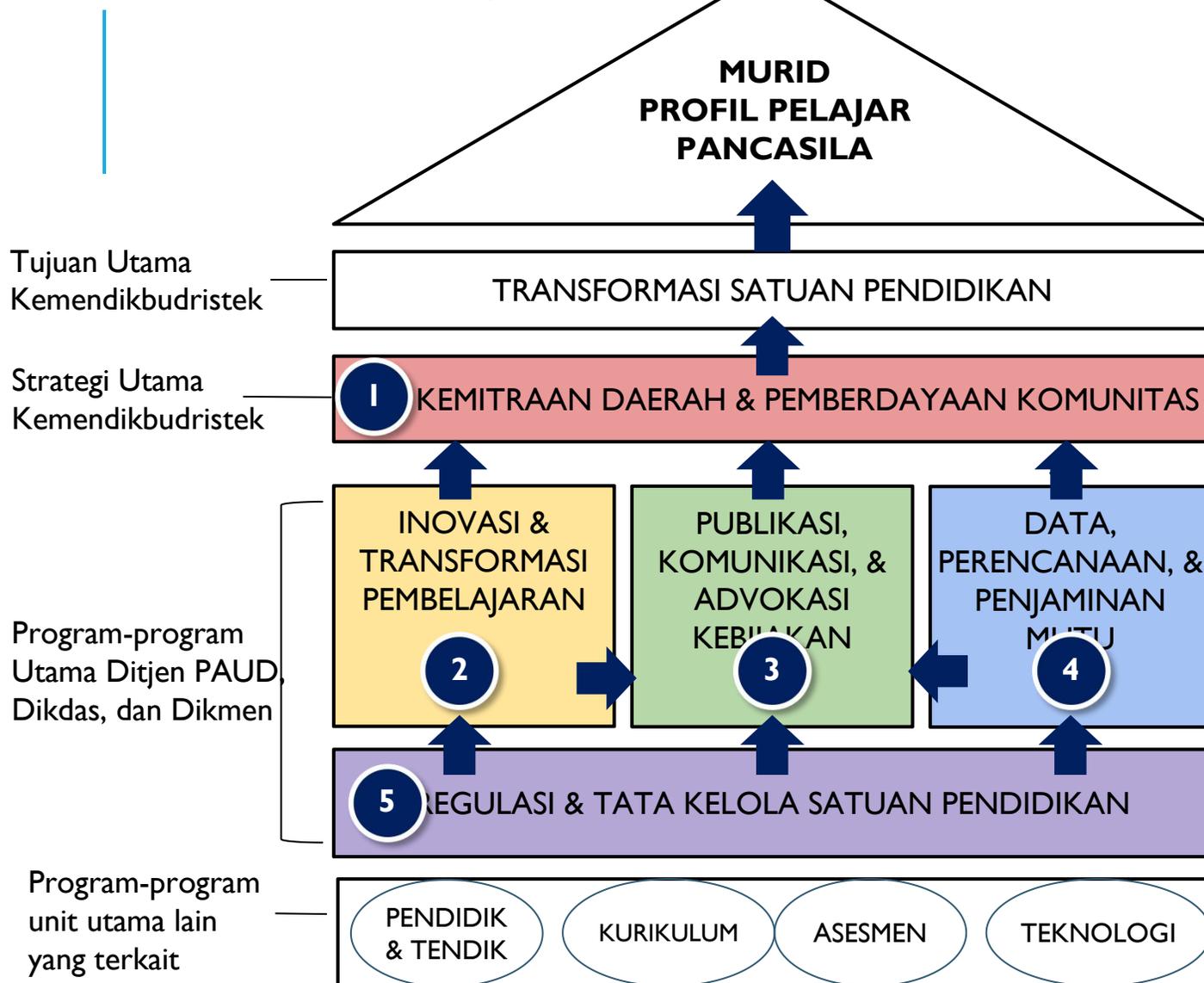
Saling **berbagi praktik baik** dengan UPT lain

7

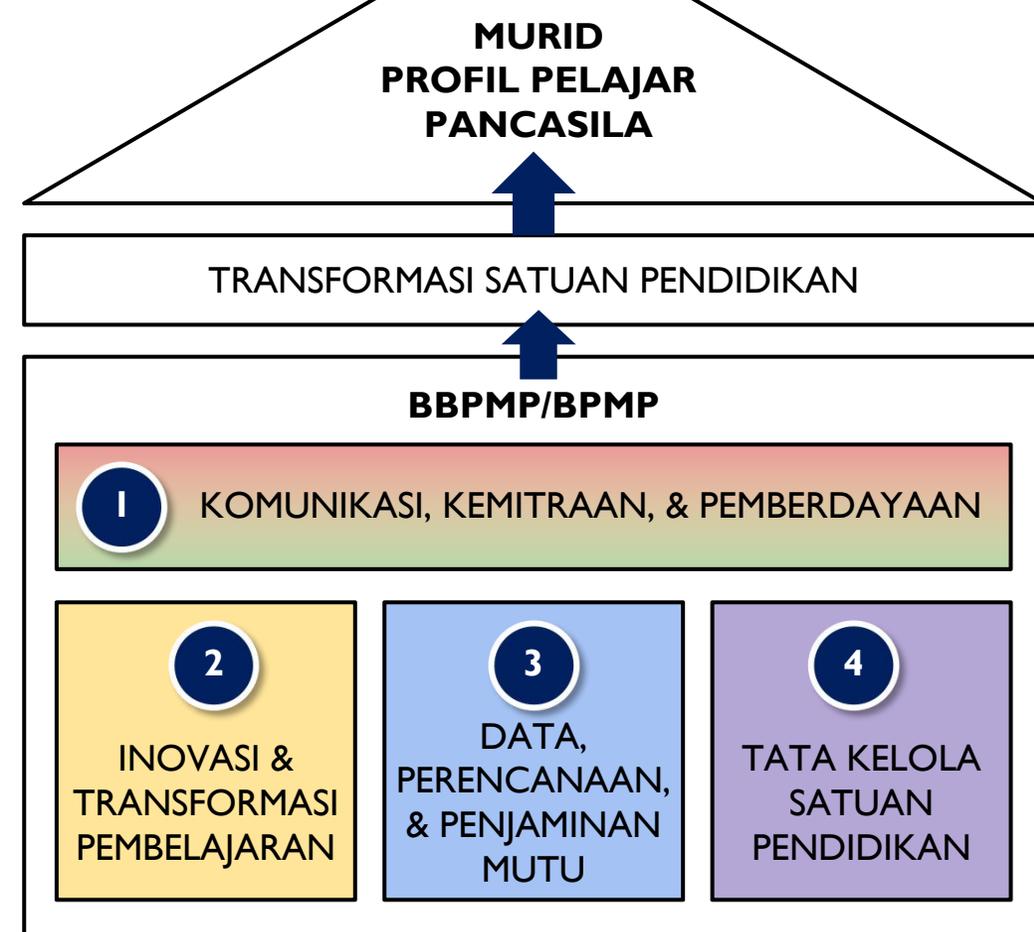
Melakukan **refleksi diri/lembaga** secara periodik

Penyelarasan Pokja UPT dengan Program Pusat *)

Kerangka Kerja Ditjen PAUD Dasmen



Kerangka Kerja UPT PAUD Dasmen



*) Penyelarasan yang dilakukan oleh Ditjen Puaddasmen

KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SUB POKJA



Bukan struktur eselon 3 dan eselon 4 yang berganti nama



Disusun berdasarkan permasalahan utama apa yang hendak kita pecahkan (***problem solving***) dan program-program prioritas merdeka belajar



Bersifat fleksibel dan dinamis



Koordinator bisa siapa saja berdasarkan relevansi kompetensi, kemauan belajar (*growth mindset*) dan kolaborasi

ADA LIMA KELOMPOK KERJA DITJEN PAUD DIKDASMEN (1 DARI 2)



1 KEMITRAAN DAERAH & PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

- Memastikan transformasi UPT PDM di 34 Provinsi dimana **UPT PDM menjadi duta Kebijakan Kemendikbudristek**
- Memastikan **program Merdeka Belajar teradvokasi** pada pemerintah daerah
- **Menggalang sumber daya** mitra pembangunan, komunitas pendidikan dan masyarakat.

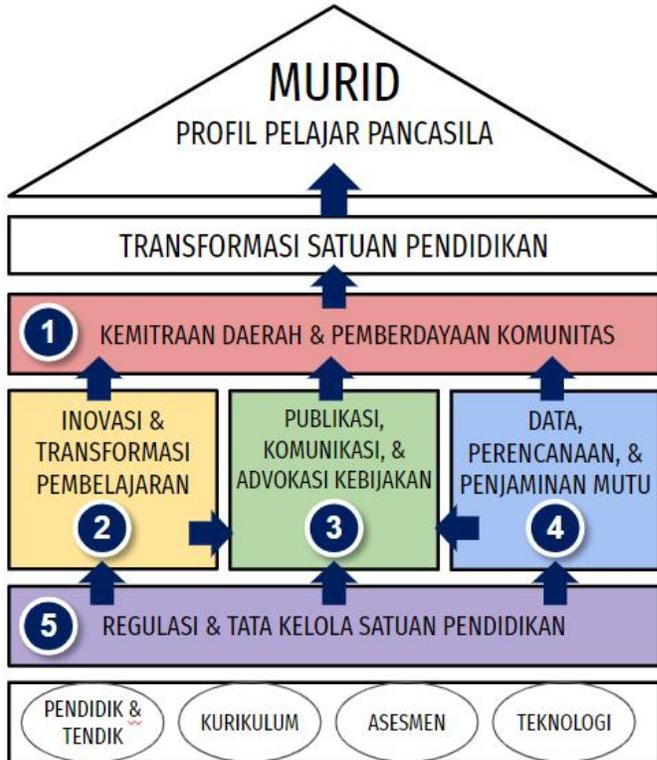
2 INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN

- Mengoordinasikan, melaksanakan, dan menyelesaikan **permasalahan implementasi kebijakan** Program Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, Transformasi Digital, Pemulihan Pembelajaran (dan Transisi Pembelajaran PAUD ke SD pada jenjang sekolah dasar)

3 PUBLIKASI, KOMUNIKASI, & ADVOKASI KEBIJAKAN

- **Menyiapkan bahan** pelaksanaan publikasi, komunikasi dan advokasi kebijakan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan sehingga mereka mengenal, memahami dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar
- Melaksanakan publikasi, komunikasi dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
- Memantau, melakukan evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi, komunikasi dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar

ADA LIMA KELOMPOK KERJA DITJEN PAUD DIKDASMEN (2 DARI 2)



4

DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU

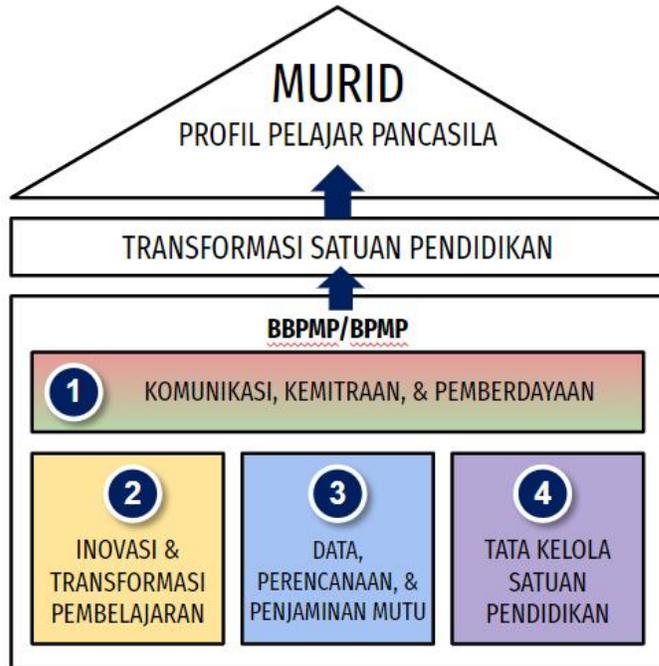
- Mengoordinasikan **pelaksanaan perencanaan berbasis data** dengan menggunakan capaian Rapor Pendidikan Daerah untuk seluruh 514 Kab/Kota dan satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- Mengoordinasikan **pelaksanaan AN 2022** dengan tingkat partisipasi AN 100%
- Mengoordinasikan program, kegiatan, dan strategi **peningkatan nilai asesmen literasi** dan numerasi peserta didik
- Mengoordinasikan program, kegiatan, dan strategi **peningkatan nilai Survei Lingkungan Belajar** pada satuan Pendidikan.

5

REGULASI & TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN

- Mengoordinasikan keberadaan dan kesesuaian regulasi –regulasi pendidikan, menyosialisasikan dan memastikan keterlaksanaannya
- Mengoordinasikan tata kelola
 - pendanaan, sarana, prasarana, dan afirmasi layanan pendidikan pendidikan di satuan pendidikan
 - pembinaan dan pengembangan diri peserta didik
 - penguatan pendidikan karakter baik

Ada empat kelompok kerja UPT PAUD Dikdasmen (1 dari 2)



1

KOMUNIKASI, KEMITRAAN, & PEMBERDAYAAN

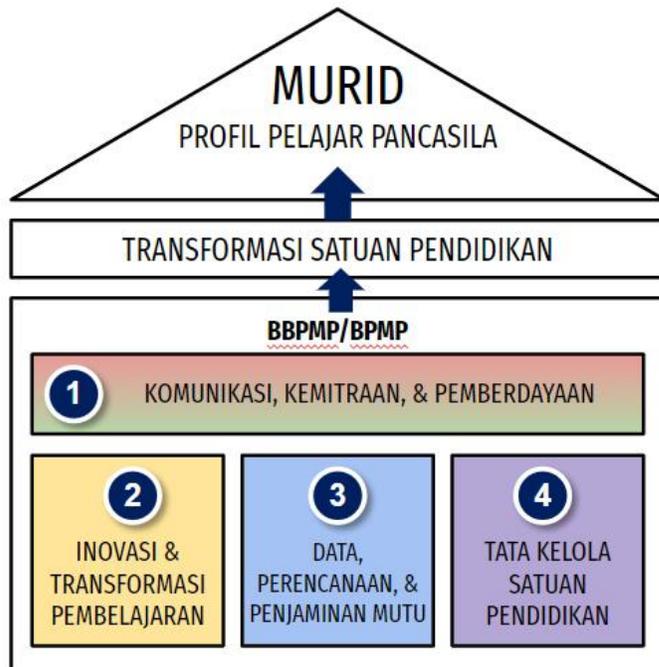
- Melaksanakan kemitraan dengan Pemerintah Daerah
- Melaksanakan kemitraan dengan mitra pembangunan, organisasi dan komunitas pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat lainnya
- Meningkatkan strategi komunikasi dan publikasi.

2

INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN

- Memastikan implementasi Program Sekolah Penggerak
- Memastikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri
- Memastikan terlaksananya Transformasi digital (akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar)

Ada empat kelompok kerja UPT PAUD Dikdasmen (2 dari 2)



3

DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU

- Memastikan penggunaan Rapor Pendidikan bagi daerah dan satuan pendidikan
- Memastikan terlaksananya Perencanaan Berbasis Data di tingkat daerah dan satuan pendidikan

4

TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN

- Pelaksanaan regulasi, BOS/BOP, DAK, PPBD, Sekolah Sehat, Peserta Didik, SIPLah, Sarana Prasarana, dll
- Tata kelola PAUD, tata kelola SD, tata kelola SMP, tata kelola SMA, tata kelola SMK (koordinasi dengan dirjen diksi), tata kelola SLB, tata kelola pendidikan non-formal

Advokasi kebijakan pendidikan pada era Merdeka Belajar sangat dibutuhkan agar tercapai hasil yang diharapkan menjadi lebih baik dan bermanfaat



Perubahan yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang meski dikhawatirkan karena keniscayaan yang perlu dialami

- Perubahan merupakan **proses yang berkesinambungan**, perlu dijaga dengan baik.
- Advokasi kebijakan, sebaiknya dipahami dari aspek perumusannya

A hand is shown reaching towards a futuristic digital interface. The interface features a large circular element with the word "AGILE" in the center. Surrounding this are various icons: a rocket, three checkmarks, a circular arrow, and a gear. The background is a dark blue with glowing lines and patterns, suggesting a high-tech or data-driven environment.

Dibutuhkan serangkaian upaya advokasi yang **bertahap, sistematis, dan berkelanjutan** untuk mempengaruhi/ mendukung/ memperbaiki kebijakan publik (regulasi dan kebijakan pemerintah) dalam melindungi dan menjaga **keadilan** dan **kesejahteraan masyarakat** secara konsisten dan bertanggungjawab.

- Secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: **agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan**

**Advokasi
kebijakan perlu
bersinergi dalam
mencapai tujuan**



mendorong SINERGI kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka transformasi satuan pendidikan yang berdampak positif pada tercapainya tujuan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia



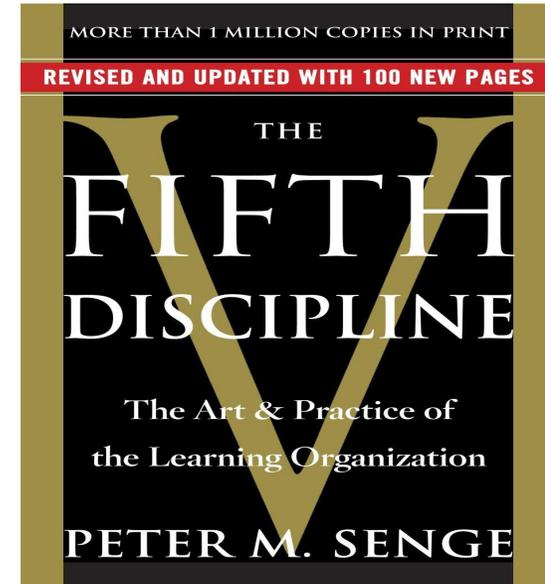
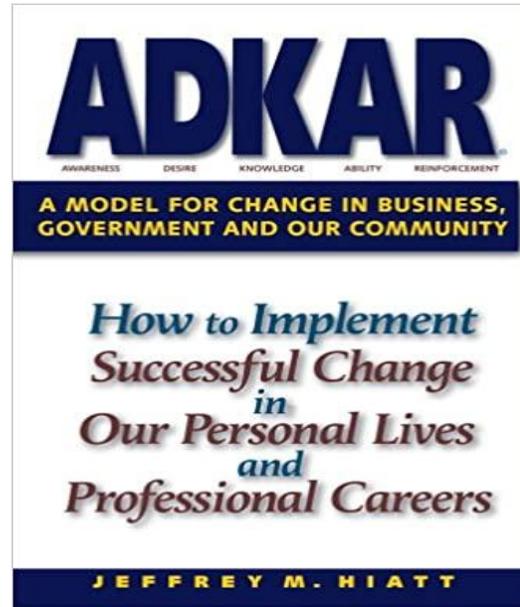
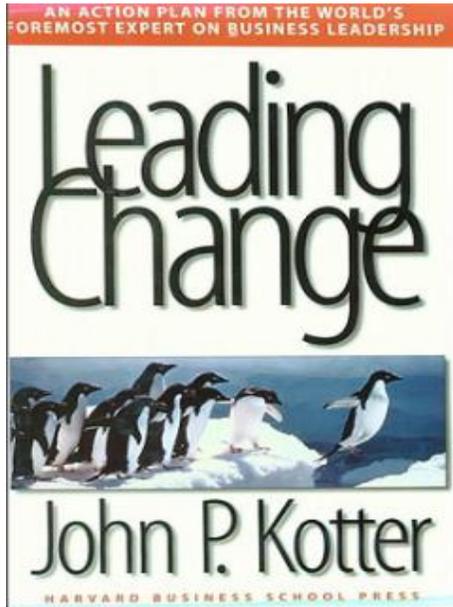


Sekian, terima kasih

Sinergi tanpa batas ruang dan waktu



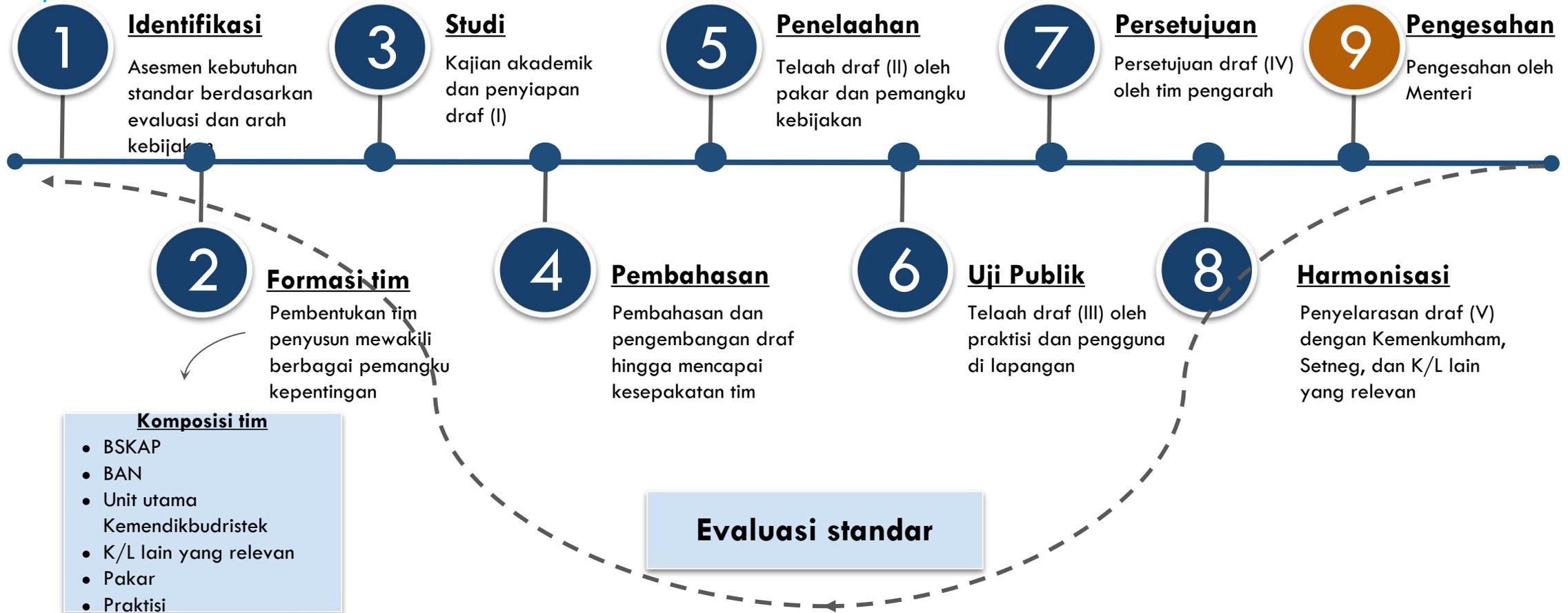
REFERENSI



- Naskah Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035
- Laporan Bank Dunia tentang Pendidikan di Indonesia, 2020
- Naskah Sistem Penjaminan Mutu Dikdasmen, 2022
- Hasil Review Kebijakan Pendidikan, 2022

- **LAIN -LAIN, SEBAGAI PENGAYAAN INFORMMASI**

Alur kegiatan penyusunan Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan



MENEMUKENALI 9 AREA MANAJEMEN YANG TERDAPAT DALAM SIKLUS PROJECT

1. Integrasi

- *Buat Project charter*
- **Buat Rencana Kerja**
- Eksekusi proyek
- **Monitor & pengendalian proyek (*issue mgmt.*)**
- **Serah terima proyek**

2. Manajemen Perubahan

- **Buat strategi manajemen pemangku kepentingan**
- **Buat rencana komunikasi**
- **Buat rencana pelatihan**
- Eksekusi rencana

3. SDM

- Identifikasi kebutuhan SDM
- **Bentuk tim**
- Mengelola tim

4. Lingkup

- **Tetapkan** ruang lingkup
- **Monitor dan kendalikan** ruang lingkup

5. Jadwal

- **Identifikasi kegiatan**
- **Tetapkan urutan kegiatan**
- Estimasi sumber daya
- **Estimasi waktu**
- **Buat jadwal**
- **Kontrol jadwal**

6. Risiko

- **Buat rencana manajemen risiko**
- **Identifikasi risiko**
- **Analisis risiko**
- **Buat rencana mitigasi risiko**
- **Monitor dan kendalikan risiko**

7. Anggaran

- Estimasi biaya
- Estimasi anggaran
- Pengendalian biaya

8. Kualitas

- **Tetapkan kualitas**
- **Jaga kualitas**

9. Pengadaan

- **Buat rencana pengadaan**
- **Lakukan pengadaan**
- **Selesai pengadaan**